



Edisi 3, September 2023, Volume XIX

INFOGATRIK

BULETIN DITJEN KETENAGALISTRIKAN



6

SIUJANG Gatrik Maju
sebagai Finalis Top Inovasi
Pelayanan Publik Tahun 2023



8

Pesona Pulau Dewata,
Lokasi Perhelatan AMEM



38

Tingkatkan Pemahaman
Terkait Nilai Ekonomi
Karbon, Ditjen Gatrik Gelar
Sharing Session



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DITJEN GATRIK TRIWULAN III TAHUN 2023

3,76

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



RINCIAN HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TRIWULAN III/2023

KRITERIA	PERFORMANCE
Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya	3,78
Kemudahan prosedur pelayanan	3,78
Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,76
Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,78
Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	3,77
<ul style="list-style-type: none">Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (layanan tatap muka)Ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (layanan online)	3,75
<ul style="list-style-type: none">Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (layanan tatap muka)Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (layanan online)	3,76
Kualitas sarana dan prasarana	3,75
Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,74
JUMLAH RESPONDEN	752

NILAI IKM
3.76
SANGAT BAIK



INFOGATRIK

BULETIN DITJEN KETENAGALISTRIKAN

Edisi 3, September 2023, Volume XIX

TIM REDAKSI

Penanggung Jawab
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Pimpinan Redaksi
Pandu Satria Jati Bonifasius

Redaktur
Anggita Miftah Hairani
Utami Hikmaasih
Agnes Tania
Dina Andriani
Ronggo Anugerah Putro Hartono

Penyunting/Editor
Ernawaty

Desain Grafis
Agus Surahman
Agah Muhammad Abduh

Sekretariat
Arujin
Fiantina Mayasari
Nur Mazidah

Alamat Redaksi
Redaksi Buletin Ketenagalistrikan
Jalan HR Rasuna Said Blok X2,
Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950

www.gatrik.esdm.go.id

DARI REDAKSI

Pembaca Setia,

Percepatan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi prioritas pemerintah. Salah satu upaya untuk mempercepat ekosistem KBLBB adalah melalui penetapan biaya layanan pengisian listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada SPKLU.

Biaya layanan tersebut merupakan insentif bagi Badan Usaha SPKLU untuk terus mengembangkan dan memperbanyak SPKLU Fast Charging dan Ultrafast Charging sehingga akan memudahkan pemilik KBLBB dalam melakukan pengisian listrik (charging) dan mendukung pengembangan ekosistem KBLBB. Ulasan lengkap mengenai hal tersebut menjadi Tajuk Utama pada Buletin Infogatrik edisi kali ini.

Dalam rubrik Liputan Khusus, kami menyajikan laporan langsung dari perhelatan The 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM). Indonesia menjadi tuan rumah acara pertemuan rutin tahunan tingkat Menteri Energi antarnegara ASEAN dengan agenda membahas perkembangan kerja sama energi. Tahun ini, AMEM diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2023.

Pada rubrik Warta Kita, beberapa isu diangkat mulai dari dukungan pengembangan transisi energi, pemerataan akses listrik melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), dan konversi sepeda motor listrik.

Selamat membaca!

Kirimkan tulisan Anda ke Buletin Ketenagalistrikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Syarat Teknis :

1. Font penulisan naskah menggunakan Arial
2. Ukuran font yang digunakan 12
3. Jarak spasi penulisan 1,5
4. Jumlah kata dalam satu naskah 600-1000 kata

Syarat Umum:

1. Judul naskah menggunakan kalimat yang menarik
2. Penulisan menggunakan bahasa yang umum (mudah dimengerti)
3. Tema naskah bisa tentang ketenagalistrikan, atau naskah umum, misalnya: tentang manajemen, pengembangan diri, dll.
4. Naskah asli belum pernah dimuat di media lain
5. Naskah bisa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
6. Naskah dikirim melalui email ke infogatrik@esdm.go.id
7. Naskah dikirim beserta foto/ilustrasi yang sesuai sebanyak tiga buah foto dengan caption
8. Penulis menyertakan biodata beserta foto diri
9. Redaksi berhak memuat naskah dengan perubahan atau tidak memuat naskah yang dikirim dalam Buletin Ketenagalistrikan

INFOGATRIK

BULETIN DJEN KETENAGALISTRIKAN

TAJUK UTAMA

- 6 Kementerian ESDM Terbitkan Regulasi Biaya Layanan Pengisian Listrik pada SPKLU

LIPUTAN KHUSUS

- 8 Pesona Pulau Dewata, Lokasi Perhelatan AMEM
- 10 Serba-Serbi Persiapan AMEM-41
- 12 Membuka Seremoni AMEM-41 & AEBF, Menteri ESDM Tekankan Interkonektivitas untuk Energi Berkelanjutan
- 14 Sukses Gelar AMEM-41, Ini Hasil Pernyataan Bersama Para Menteri Energi
- 16 AMEM-41 Spouse Program: Menikmati Cita Rasa Budaya Bali yang Harmonis
- 18 Liaison Officer AMEM-41 Bercerita: Kesan, Pesan, Harapan

KABAR

- 20 Kementerian ESDM Apresiasi PLN NP Dalam Mewujudkan Transisi Energi Melalui Pengelolaan Pembangkit EBT
- 22 Dirjen Gatrik Kenalkan Program Kinerja Ketenagalistrikan pada ASN Muda ESDM
- 24 25 Tahun MKI, Pemerintah Harapkan Kontribusi Aktif dalam Transisi Energi
- 26 Ditjen Gatrik Tekankan Energi Bersih Pada Kunker Spesifik Komisi VII ke PLTU Suralaya
- 28 Dukung Pengembangan Transisi Energi, Ditjen Gatrik Gelar Bedah Paper
- 30 Program BPBL 2023 Sasar Rumah Tangga 900 VA
- 32 Pimpin Upacara HUT RI Ke-78, Dirjen Gatrik Tekankan Target Net Zero Emissions 2060 Sebagai Upaya Indonesia Menjadi Negara Maju di Tahun 2045
- 34 Pemerataan Akses Listrik melalui Program BPBL yang Aman, Andal dan Laik Operasi
- 36 Pembagian Peran Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Peningkatan Investasi Ketenagalistrikan
- 38 Agustusan di Gatrik: "Gatrik, Merdeka! Gatrik, Jaya! Gatrik, Okeeee!!!"
- 40 Bantuan Pasang Baru Listrik, Upaya Mencapai Target Rasio Elektrifikasi 100%

- 42 Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Pemerataan Listrik Masyarakat Melalui BPBL
- 44 Kunjungi PLTU Sumsel 8, Dirjen Gatrik Pastikan Daya Listrik Segera Tersalurkan di Sistem Sumatera
- 46 Integrasi Biofuel dalam Peta Jalan Energi Baru Terbarukan
- 48 Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Monitoring dan Evaluasi Program BPBL
- 50 Pemerintah Resmi Buka Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik
- 52 Perkenalkan Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik, Gatrik Goes to Campus Digelar di UNS

FOTO BERCEKITA

- 54 Lomba 17an Gatrik

POJOK LITERASI

- 56 Electricity from Sunlight: An Introduction to Photovoltaics
- 56 Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan

QUIZ CORNER

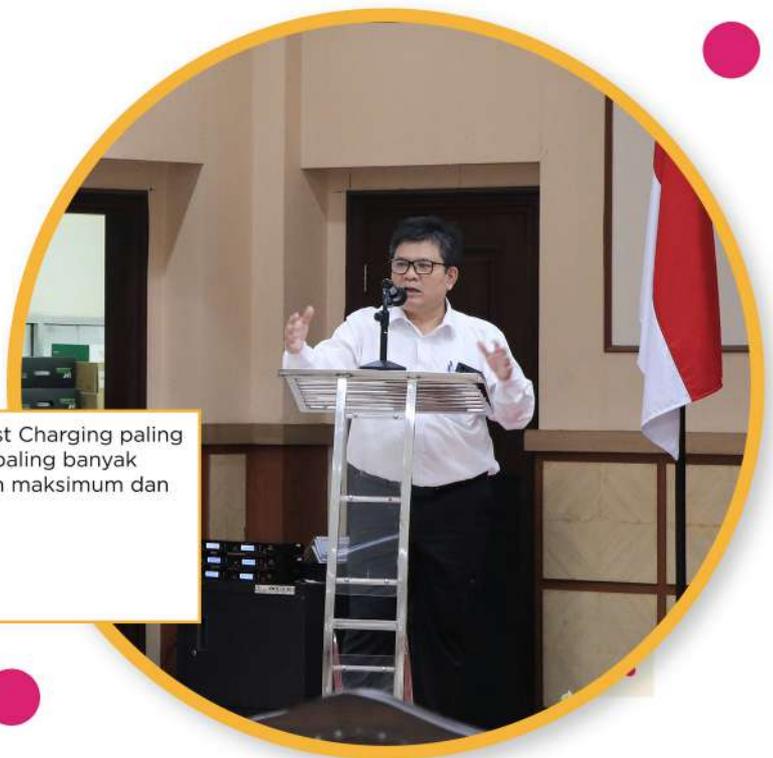
- 57 Cari Kata
- 58 Pemenang TTS Buletin Juni

KEMENTERIAN ESDM TERBITKAN REGULASI BIAYA LAYANAN PENGISIAN LISTRIK PADA SPKLU

“

“Besaran Biaya Layanan pengisian listrik untuk SPKLU Fast Charging paling banyak Rp.25.000,- sedangkan untuk Ultrafast Charging paling banyak Rp.57.000,-. Biaya layanan ini bersifat ceiling atau batasan maksimum dan dikenakan untuk setiap 1 (satu) kali charging.”

Jisman Hutajulu
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu membuka acara Sosialisasi Tarif dan Biaya Layanan Untuk Percepatan Pengembangan Charging Station di Jakarta, Senin, (31/07/2023).

Guna mengakselerasi percepatan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan biaya layanan pengisian listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Ketentuan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam acara Sosialisasi Tarif dan Biaya Layanan Untuk Percepatan Pengembangan Charging Station di Jakarta, Senin, (31/07/2023).

Menurut Jisman, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis

Baterai, pemilik KBLBB dapat dikenai biaya layanan pengisian listrik untuk setiap satu kali pengisian listrik pada SPKLU Fast Charging atau Ultrafast Charging.

Seperti diketahui, teknologi pengisian pada SPKLU untuk kendaraan beroda empat atau lebih meliputi: Teknologi Pengisian Lambat (Slow Charging), Teknologi Pengisian Menengah (Medium Charging), Teknologi Pengisian Cepat (Fast Charging), dan Teknologi Pengisian

Sangat Cepat (Ultrafast Charging). Tarif tenaga listrik diberlakukan untuk pengisian listrik dari Badan Usaha SPKLU kepada pemilik KBLBB sesuai dengan tarif tenaga listrik untuk keperluan layanan khusus (L) menggunakan faktor pengali N paling tinggi 1,5 (satu koma lima) dan merupakan biaya pembelian tenaga listrik atau energy charge (kWh).

Jisman menyebutkan, Biaya Layanan tersebut merupakan insentif bagi Badan Usaha SPKLU untuk terus mengembangkan dan memperbanyak SPKLU Fast Charging dan Ultrafast Charging sehingga akan memudahkan pemilik KBLBB dalam melakukan pengisian listrik (charging) dan mendukung pengembangan ekosistem KBLBB.



“Besaran Biaya Layanan pengisian listrik untuk SPKLU Fast Charging paling banyak Rp.25.000,- sedangkan untuk Ultrafast Charging paling banyak Rp.57.000,-. Biaya layanan ini bersifat ceiling atau batasan maksimum dan dikenakan untuk setiap 1 (satu) kali charging,” ungkap Jisman.

Lebih lanjut Jisman menyebutkan bahwa badan usaha SPKLU dapat menerapkan biaya layanan di bawah Penetapan Menteri ESDM, dengan pertimbangan dan strategi masing-masing Badan Usaha. Besaran biaya layanan tersebut dilakukan evaluasi setiap dua tahun, untuk melihat keekonomian dan kewajaran biaya.

“Saat ini sudah terdapat 129 unit SPKLU Fast Charging dan 47 unit SPKLU Ultrafast Charging. Harapannya dengan adanya

biaya layanan ini, akan semakin banyak lagi unit SPKLU Fast dan Ultrafast Charging, khususnya pada jalur-jalur jarak jauh seperti jalan tol, jalan nasional, dan lainnya,” pungkask Jisman.

Perlu dukungan semua pihak

Jisman menjelaskan bahwa Peran Sektor ESDM dalam percepatan program KBLBB melalui tiga hal, yaitu: pengaturan standar dan keselamatan dari instalasi pengisian listrik SPKLU dan SPBKLU, pengaturan ketentuan usaha ketenagalistrikan dari pengelolaan SPKLU dan SPBKLU, serta penetapan tarif tenaga listrik untuk transaksi jual beli listrik di usaha SPKLU dan SPBKLU.

Seperti diketahui, Kementerian ESDM

telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Regulasi ini merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 dengan menambahkan pengaturan jenis teknologi, integrasi aplikasi charging EV serta penerapan tarif tenaga listrik untuk kendaraan listrik.

“Revisi regulasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha di bidang infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta meningkatkan minat dan ketertarikan badan usaha untuk berinvestasi di sektor pengisian kendaraan listrik, sekaligus meningkatkan jumlah penggunaan kendaraan listrik di tengah masyarakat,” pungkask Jisman.



Jisman menyampaikan bahwa percepatan pengembangan ekosistem KBLBB memerlukan upaya kerja sama antara berbagai pihak. Ia menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat merencanakan dan memfasilitasi pembangunan SPKLU & SPBKLU di lokasi-lokasi strategis, seperti tempat parkir atau area transportasi publik lainnya untuk meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas KBLBB.

“Pemerintah Pusat dan Daerah juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam membangun kemitraan dengan swasta,” ujarnya.

Disebutkan Jisman bahwa saat ini Pemerintah juga sedang melaksanakan Program Enhancing Readiness For The Transition To Electric Vehicle In Indonesia (ENTREV), yaitu program kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan United Nations Development Programme dalam rangka meningkatkan kesiapan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“Saya berharap program-program ENTREV dapat mendukung percepatan ekosistem KBLBB di Indonesia,” tutup Jisman.(RA)



Pesona Pulau Dewata, Lokasi Perhelatan AMEM

Indonesia menjadi tuan rumah The 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM), acara pertemuan rutin tahunan tingkat Menteri Energi antar negara ASEAN dengan agenda membahas perkembangan kerja sama energi. Tahun ini, AMEM akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2023.

"Pengalaman dari Keketuaan Indonesia di AMEM-31 yang lalu saat Indonesia menjadi tuan rumah, delegasi yang mengikuti pertemuan tersebut sangat terkesan dengan hospitality di Bali. Mereka berharap dapat mengulang keindahan tersebut pada AMEM-41," ujar Ketua Bidang Kesekretariatan Penyelenggaraan Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk Sektor Energi Rr. Yoga Dwasti Kenyo.

Selain memiliki keindahan alam, Bali juga memiliki kesenian dan budaya yang unik serta menarik. Provinsi yang beribukota di Denpasar ini juga dikenal dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura karena mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu.



Pulau Bali saat ini juga didaulat sebagai satu-satunya pulau yang memiliki patung tertinggi di Indonesia, Patung tersebut bernama Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang berdiri setinggi 129 meter dan terletak di lahan seluas 60 hektar. Patung GWK terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta. Pembuatan Patung GWK sendiri membutuhkan waktu 28 tahun dan dipersembahkan oleh pembuatnya I Nyoman Nuarta untuk tanah kelahirannya.

Sebagai tempat tujuan wisata, Bali memiliki banyak destinasi wisata yang menarik, antara lain, Pantai Kuta, Pura Tanah Lot, Danau Beratan Bedugul, Uluwatu, Ubud, Kintamani, dan masih banyak yang lainnya.



Di Bali juga terdapat saluran irigasi atau perairan sawah secara tradisional yang bernama Subak dan sudah menjadi situs warisan dunia. Subak dilestarikan oleh masyarakat Bali untuk mengatur saluran irigasi atau perairan sawah dengan berpedoman pada filosofi Tri Hita Karana. Filosofi ini artinya tiga penyebab terciptanya kebahagiaan sehingga masyarakat tetap bisa mengairi sawahnya secara demokratis dan hierarkis sesuai pembagian peran masing-masing petani.

Kunjungan ke Pusat Seni Budaya Hingga Geopark

Pada hari kelima pelaksanaan AMEM-41 yaitu tanggal 26 Agustus 2023, para delegasi akan diajak berkeliling melihat tempat-tempat wisata di Bali, yaitu Werdhi Budaya Art Center, Batur, dan Museum Geopark Batur.

Taman Werdhi Budaya Art Centre adalah kompleks bangunan budaya dan



para delegasi akan diajak berkeliling melihat tempat-tempat wisata di Bali, (26/08/2023).

hiburan di Denpasar. Taman ini juga difungsikan untuk pementasan seni serta budaya. Pengunjung bisa melihat banyak area untuk pertunjukan seni, selain panggung pementasan seni, ada juga galeri indoor yang menampilkan banyak kerajinan seni. Seperti kerajinan kain tenun, perhiasan, patung serta lukisan, serta pasar malam, lokasi dari Taman Werdhi Budaya Art Centre, tepat berada di tengah-tengah kota Denpasar.

Museum Geopark Batur merupakan museum yang pada awalnya bernama museum Gunungapi Batur. Museum yang berada di selatan Gunung batur ini menyajikan informasi geopark nasional dan geopark global. Museum ini dibangun atas kerja sama antara Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Bappeda Kabupaten Bangli dan diresmikan tanggal 10 Mei 2007 oleh Menteri ESDM.



Serba-Serbi Persiapan AMEM-41

Suara handy talky bersahutan, derap langkah kaki berjalan hilir mudik memasuki venue dan ruangan-ruangan yang akan digunakan sebagai ruang acara dan pertemuan. Seperti itulah gambaran kesibukan panitia persiapan The 41st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM).

Acara pertemuan tingkat Menteri Energi antar Negara ASEAN ini rutin diadakan setiap tahunnya, dengan agenda membahas kerja sama intensif dalam pengembangan dan eksploitasi potensi sumber daya energi di kawasan ASEAN. Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah AMEM dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memimpin persidangan AMEM yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2023.

Ketua Bidang Persidangan dan Management Event AMEM-41, Alfi menyampaikan bahwa seluruh persiapan saat ini sudah selesai, mulai dari bidang teknis, venue/ lokasi acara ataupun yang terkait dengan substansi dipersidangan juga sudah selesai disiapkan.

"Semua sudah dipersiapkan dari kemarin, terkait dengan outcome-outcome yang harus dicapai, ada joint opening, penandatanganan MoU, minister CEO dialog, harus dipersiapkan dengan baik, yang pasti terus berprogres," ujar Alfi, Selasa (22/8/2023), di Bali Nusa Dusa Convention Center (BNDCC).



Tugas utama LO adalah mengkoordinasikan kegiatan dan komunikasi di antara delegasi negara dan panitia.

Menurut Alfi, dari semua persiapan yang sudah dilakukan, koordinasi merupakan hal yang berperan sangat penting dalam kesuksesan suatu acara. Acara akan berjalan baik jika koordinasi yang baik sudah bersama-sama dilakukan, untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien.

“Yang paling susah mensinkronkan koordinasi antara satu bidang ke bidang lainnya, karena kenapa, kalau sampai koordinasinya kurang, jangan sampai missed di bidang lainnya. Mau persiapan sebagus apapun kalau tidak bagus koordinasinya, akan menjadi kurang maksimal,” pungkas Alfi.

Ditemui ditempat yang sama, Teta, Koordinator Protokol Kementerian ESDM menyampaikan bahwa dalam rangkaian kegiatan AMEM-41 ini ada sekitar 20 orang personel dari unit Kementerian ESDM yang bertugas, dan saat ini sudah dilakukan koordinasi dengan Polda Bali.

“Untuk pengamanan, tadi pagi sudah di gelar apel pasukan yang langsung dipimpin oleh Kapolda Bali, rencananya akan diterjunkan sejumlah 614 personil, kesiapan kegiatan opening akan dilakukan runtrough kegiatan, kemudian untuk penyambutan Para Menteri dari bandara nanti dilakukan oleh Eselon I KESDM,” imbuh Teta.

Teta juga menambahkan bahwa persiapan yang sudah dilakukan oleh tim protokoler antara lain, airport handling, persiapan personil di Bandara Soekarno Hatta untuk delegasi yang transit. Terkait dengan akses di Bandara Ngurah Rai, disiapkan juga dua jalur, ada jalur VIP untuk para Menteri dan jalur umum untuk para SOE Leader dan delegasi lainnya, kemudian juga disiapkan jalur khusus untuk imigrasi, terkait dengan delegasi AMEM.

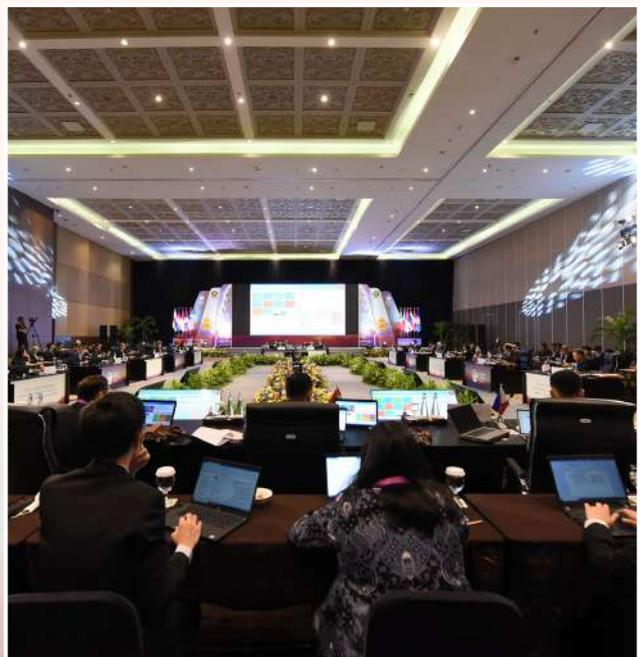
“Kesulitan dalam persiapan sudah ditanggulangi. Perlu hati-hati dalam setiap melaksanakan protokoler, dan berharap acara bisa berjalan lancar dan tertib sesuai dengan apa yang sudah direncanakan”, sambung Teta.

Hal senada juga disampaikan Suryo, selaku Koordinator Liaison Officer (LO). Suryo menyampaikan bahwa tugas utama LO adalah mengkoordinasikan kegiatan dan komunikasi di antara delegasi negara dan panitia. Menurutnya, keberhasilan setiap acara kenegaraan juga tak lepas dari peran serta LO.

“Menjadi seorang LO itu modalnya harus pintar berkomunikasi, karena LO itu tugas utamanya menjembatani panitia dan delegasi, jadi komunikasi harus bagus, kemudian juga harus cekatan dan punya daya ingat tinggi, mampu mengerti setiap rundown dan kegiatan dan dapat mengkomunikasikan dengan baik ke delegasi,” pungkas Suryo.

Suryo menyatakan bahwa hal yang perlu dipersiapkan dalam LO dalam AMEM-41 ini adalah paham tentang ASEAN dan keterkaitannya, kemudian juga mengerti bagaimana cara melayani pimpinan, tamu VIP, yang paling penting juga harus memiliki wawasan terkait dengan ESDM dan sektor energi.

“AMEM-41 ini total ada 55 LO yang bertugas dan dibagi ke tiap delegasi, semuanya tergantung jumlah delegasi, meski awalnya kesulitan mencari temen-temen di unit KESDM yang mau jadi LO, karena banyak yang berhalangan, namun itulah challenging, susah tidak, mudah juga tidak,” ungkap Suryo. (RA)



MEMBUKA SEREMONI AMEM-41 & AEBF, MENTERI ESDM TEKANKAN INTERKONEKTIVITAS UNTUK ENERGI BERKELANJUTAN

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menekankan pentingnya interkoneksi untuk energi berkelanjutan antarnegara ASEAN. Menurutnya tiga pilar energi ASEAN yaitu berkelanjutan, keamanan, dan interkoneksi adalah kunci dalam mewujudkan keamanan energi berkelanjutan. Interkoneksi menjadi agenda penting dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN Ministers on Energy Meeting (41st AMEM) tahun 2023.

Pernyataan ini disampaikan Arifin pada sambutannya saat membuka Joint Opening Ceremony of the Forty First Asean Ministers on Energy Meeting (41st AMEM) & The ASEAN Energy Business Forum di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/08/2023).

"Tagline energi ASEAN memuat tiga pilar energi, berkelanjutan, keamanan, dan interkoneksi. Pilar-pilar ini mewakili tantangan utama kami mempercepat konektivitas energi untuk mencapai pertumbuhan ASEAN yang berkelanjutan," ujarnya.

Selanjutnya Arifin menjelaskan bahwa untuk mengupayakan interkoneksi bidang energi di tingkat ASEAN, maka akan dilakukan interkoneksi melalui Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) dan ASEAN Power Grid (APG), serta komitmen antar pihak lainnya yang terlibat. Platform-platform ini nantinya diharapkan dapat mendukung menuju jalur energi berkelanjutan dan keamanan energi demi pertumbuhan ASEAN yang aman dan berkelanjutan.

"Untuk mewujudkan hal ini, kami akan meningkatkan interkoneksi melalui Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP) dan ASEAN Power Grid (APG), serta komitmen antar pihak lainnya," kata Arifin.

Pada kesempatan ini Arifin juga menyambut Timor Leste sebagai anggota baru ASEAN.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif membuka Joint Opening Ceremony of the Forty First Asean Ministers on Energy Meeting (41st AMEM) & The ASEAN Energy Business Forum di Nusa Dua, Bali, Kamis (24/08/2023).

"Timor Leste diharapkan dapat mempelajari kemajuan dan implementasi kerja sama energi di ASEAN melalui program-program dan pertemuan terkait," terangnya.

Di akhir sambutan, Arifin berharap AMEM-41 dan AEBF akan berkontribusi terhadap investasi dan kerja sama pada tiga pilar energi ASEAN.

"Sukses kita pada dua perhelatan penting ini merupakan upaya pencapaian fase kedua ASEAN Plan for Energy Cooperation dan target Net Zero Emissions (NZE) masing-masing negara," pungkashya.

Senada, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana juga menekankan pentingnya interkoneksi di

ASEAN. Lebih lanjut Dadan menyampaikan bahwa untuk mensinergikan sumber daya di ASEAN diperlukan infrastruktur interkoneksi.

"Untuk memanfaatkan dan mensinergikan sumber daya di seluruh wilayah diperlukan infrastruktur interkoneksi untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri (ASEAN)," ujar Dadan.

ASEAN Energy Business Forum (AEBF) merupakan konferensi dan pameran resmi ASEAN di bidang energi yang menghadirkan para pembuat kebijakan tingkat regional dan internasional serta para pelaku bisnis utama. Sedari awal, pertemuan ini diselenggarakan bersamaan dengan Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) tahunan. (RO)



"Tagline energi ASEAN memuat tiga pilar energi, keberlanjutan, keamanan, dan interkoneksi."

Arifin Tasrif

Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral



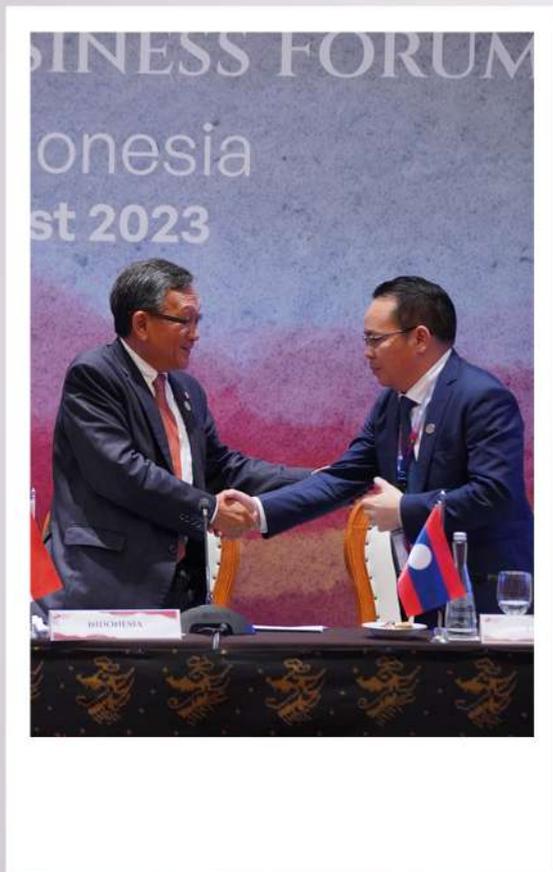
"Untuk memanfaatkan dan mensinergikan sumber daya di seluruh wilayah diperlukan infrastruktur interkoneksi untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri (ASEAN)."

Dadan Kusdiana

Sekretaris Jenderal
Kementerian ESDM

SUKSES GELAR AMEM-41,

INI HASIL PERNYATAAN BERSAMA PARA MENTERI ENERGI



Indonesia dan Laos PDR sebagai Ketua dan Wakil Ketua telah sukses memimpin Pertemuan Menteri Energi ASEAN (AMEM) ke-41 dengan menghasilkan Joint Ministerial Statement (JMS) yang berisi pelaksanaan hasil deklarasi bersama terkait ketahanan energi yang berkelanjutan melalui interkoneksi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada Konferensi Pers AMEM-41 di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/08/2023).

“Selain itu pengakuan atas strategi ASEAN tentang Netralitas Karbon, Kerangka Ekonomi Sirkular Masyarakat Ekonomi ASEAN, Taksonomi ASEAN untuk Keuangan Berkelanjutan, dan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN, untuk mendukung agenda keberlanjutan ASEAN lintas sektoral,” ujar Arifin.

Arifin menyampaikan pada pernyataan bersama menghasilkan update perkembangan implementasi ASEAN Plan for Energy Cooperation (APAEC) Tahap II 2021-2025 melalui ASEAN Power Grid (APG), Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP), Coal and Clean Coal Technology (CCT), Energy Efficiency and Conservation (EE&C), Renewable Energy (RE), Regional Energy Policy and Planning (REPP), dan Civilian Nuclear Energy.

“Mencatat kemajuan kerja sama antara ASEAN dan IRENA mengenai target energi terbarukan ASEAN, memperhatikan perkembangan kerja sama energi ASEAN-AS untuk mempercepat transisi energi, dan menganugerahkan ASEAN Energy Awards 2023 untuk praktik terbaik dalam efisiensi dan konservasi energi, energi terbarukan, manajemen energi, teknologi batubara ramah lingkungan, dan generasi muda,” tambah Arifin.



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada Konferensi Pers AMEM-41 di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/08/2023).

Bersamaan dengan AMEM ke-41, Indonesia juga memimpin pertemuan-pertemuan terkait Dialog AMEM-AS ke-3, Dialog AMEM-IRENA ke-7, AMEM+3 ke-20, dan Pertemuan Menteri Energi KTT Asia Timur ke-17.

Menteri-menteri Energi ASEAN mendukung Deklarasi Bersama tentang Keamanan Energi Berkelanjutan melalui Interkonektivitas. Deklarasi Bersama ini berfokus pada interkonektivitas energi, yang merupakan prioritas pencapaian ekonomi Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023. Deklarasi ini antara lain menekankan pada perluasan APG dan TAGP.

Indonesia, Laos dan Brunei Darussalam telah menandatangani Instrumen Perpanjangan MoU APG pada AMEM-41, dan dilanjutkan dengan penandatanganan Menteri-menteri negara ASEAN lainnya pada akhir tahun.

"Selain JMS AMEM ke-41, para Menteri Energi ASEAN dan Mitra Dialog juga mencapai konsensus mengenai AMEM+3 JMS dan Pernyataan Ketua EAS EMM," ujar Arifin.

Arifin juga menyampaikan bahwa Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-41 dan Pertemuan Terkaitnya, menandai tonggak sejarah yang luar biasa bagi

Proyek Interkoneksi Ketenagalistrikan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina (BIMP) sebagai perdagangan ketenagalistrikan multilateral berikutnya di ASEAN setelah LTMS (Lao PDR, Thailand, Malaysia dan Filipina). Laos akan menjabat sebagai Ketua Energi ASEAN pada awal tahun 2024 sesuai dengan masa jabatan Ketua ASEAN.

Pada kesempatan yang sama Vice Chair Lao PDR Akhondeth Vongsay Laos berkomitmen untuk mencapai hasil-hasil ekonomi prioritasnya pada tahun 2024. Hasil-hasil ini penting bagi pemulihan ekonomi dan pertumbuhan kawasan ASEAN dan juga penting dalam transisi menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Ia juga mengatakan penting bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

"Saya berasumsi bahwa dengan bekerja sama, kita dapat membangun masa depan yang lebih tangguh, sejahtera, dan berkelanjutan untuk kawasan ASEAN serta dukungan dari mitra-mitra kita di komunitas internasional," ujar Akhondeth.

Konferensi Pers tersebut dihadiri oleh Negara Anggota ASEAN (AMS), Negara

Mitra Dialog dan Organisasi Internasional. AMEM ke-41 ini juga dihadiri oleh Timor Leste sebagai Observer.

Penandatanganan Nota Kesepahaman

Arifin juga menyaksikan penandatanganan beberapa MoU antara badan usaha ketenagalistrikan dan juga antara ASEAN Centre for Energy (ACE) dan para mitra. Perpanjangan MoU APG akan menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan interkonektivitas Jaringan Listrik, yang menunjukkan bahwa APG tetap menjadi program utama kerja sama energi di bawah Rencana Aksi ASEAN untuk Kerja Sama Energi (APAEC).

Penandatanganan dua MoU antara Indonesia Power Utilities (PLN) dengan Malaysia Power Utilities (TNB dan Sabah Electricity) merupakan implementasi langsung dari Pernyataan Bersama Proyek Integrasi Ketenagalistrikan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Filipina (BIMP), yang juga sejalan dengan prioritas tahun ini.

Diharapkan dengan kerja sama ini akan memperkuat dan meningkatkan upaya kita dalam mencapai ketahanan energi berkelanjutan serta mendorong upaya kita untuk mempercepat transisi energi. (AT)



AMEM-41 SPOUSE PROGRAM:

**MENIKMATI CITA RASA
BUDAYA BALI
YANG HARMONIS**



Matahari pagi itu riang bersinar, cerah cahayanya menyinari Pulau Bali, Pulau Dewata tempat perhelatan ASEAN Ministers on Energy Meeting (41st AMEM) tahun 2023 digelar. Gambaran yang sama juga terlihat jelas di wajah para peserta AMEM-41 Spouse Program.

Kegiatan ini merupakan program yang diperuntukkan bagi pasangan para Menteri dan Pemimpin Tinggi peserta AMEM-41. Program ini disiapkan untuk memperkenalkan Bali sebagai bagian dari Budaya Indonesia beserta keindahan alamnya.

Hal ini seperti disampaikan oleh Ratna Arifin Tasrif (pendamping Menteri ESDM) dalam sambutannya saat membuka acara tersebut, Jumat (25/08/2023), di Nusa Dua.

“Program pasangan ini disiapkan khusus oleh tim kami agar Anda dapat menikmati sedikit cita rasa budaya Bali dengan pemandangan dan suasananya yang indah,” ujar Ratna.

Cita rasa budaya Bali yang disuguhkan bagi para peserta adalah berkunjung ke Desa Panglipuran, sebuah desa adat yang menjadi salah satu primadona pariwisata di Bali. Desa wisata ini terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Setelah sampai di Desa Panglipuran yang merupakan desa terbersih nomor satu di Indonesia, para peserta disuguhi welcome drink Kelapa Nyuh Gading beserta Tari Gabor dengan iringan Gong Kebyar.



Ratna Arifin Tasrif bersama pasangan para Menteri dan Pemimpin Tinggi peserta AMEM-41, Jumat (25/08/2023), di Nusa Dua.

Para peserta lalu mengunjungi rumah penduduk setempat, menikmati minuman khas Desa Panglipuran loloh cemcem dan membuat canang sari. Loloh cemcem merupakan minuman khas yang terbuat dari daun cemcem, dibuat secara tradisional dan tidak menggunakan pengawet atau pemanis buatan. Ini merupakan sejenis minuman herbal untuk kesehatan. Di rumah penduduk, para peserta juga dipandu untuk membuat canang sari.

Canang sari merupakan wadah persembahan yang sering digunakan dalam kegiatan persembahan sehari-hari oleh umat Hindu Bali. Para peserta dituntun oleh pemandu untuk menyusun wadah canang yang tersusun dari beberapa bahan seperti janur kelapa dan batang bambu untuk dirangkai sebagai wadah.

Kegiatan di Desa Panglipuran diakhir dengan makan siang bersama di Monumen Pahlawan Wantilan, setelah sebelumnya mengabadikan foto bersama di depan Pura Penataran Desa Panglipuran.

Dalam kesempatan tersebut, Diny Darmawan Prasadjo (pendamping Direktur Utama PLN) menyampaikan bahwa Spouse Program ini disusun untuk memperkuat ikatan para spouse di AMEM-41 agar tercipta persatuan dan keharmonisan.

“Pertemuan kita hari ini bukan hanya untuk mempererat persahabatan saja. Namun ini merupakan simbol persatuan dan keharmonisan diantara kita” ujar Diny.

Setelah Makan siang bersama, peserta menikmati agenda selanjutnya yaitu mengunjungi Alas Harum.

Alas harum merupakan agro wisata kopi luwak yang sangat populer di Bali. Para peserta diperkenalkan dengan produksi kopi luwak dengan menggunakan cara produksi tradisional. Alas Harum menjadi agenda penutup kegiatan hari itu sebagai simbol keharmonisan negara-negara anggota ASEAN. (RO)





LIAISON OFFICER AMEM-41 BERCEKITA: KESAN, PESAN, HARAPAN

Kesuksesan penyelenggaraan The 41st ASEAN Ministries on Energy Meeting (AMEM-41) serta terlaksananya berbagai pertemuan Bilateral Negara ASEAN sampai tercapainya berbagai penandatanganan kesepakatan (MoU), tidak lepas dari peran serta Liaison Officer (LO) yang bekerja mendampingi para delegasi sepanjang acara ini digelar.

Para LO dituntut bekerja dengan teliti, berhati-hati, memperhatikan pilihan kata, serta memberikan rekomendasi kepada para delegasi agar mereka dapat menghadiri pertemuan demi pertemuan yang sudah padat terjadwal dan tidak terlewat.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Hanan Arifah, LO yang mendampingi delegasi dari Brunei Darussalam pada Sabtu (16/08/2023) di Nusa Dua, Bali.

“Untuk provide apa yang tamu inginkan khususnya tamu yang detail dan protokol banget, memberikan rekomendasi sesuatu yang awalnya kita pun tidak tahu, diberi tugas atau perintah

sewaktu-waktu,” ujar Hanan saat ditanya tentang tugas-tugas LO.

Perbedaan bahasa serta budaya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi LO selama penyelenggaraan AMEM, di sinilah peran LO sebagai pendamping delegasi menjadi penting. Hal itu diungkapkan oleh Seprinaldi (Asep), LO delegasi Australia.

“Perbedaan culture dan habit mungkin salah satu tantangan dalam menjadi LO, khususnya Australia. Delegasi tidak mau diperlakukan istimewa, mandiri, dan kadang tidak ingin didampingi langsung oleh LO. Informasi dari staff kedutaan besar Australia memang budaya Australia itu tidak terdapat perbedaan perlakuan untuk staff biasa dan pejabat,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Valerie Paulina, LO untuk Organisasi International ASEAN Council of Petroleum (ASCOPE). Baginya intonasi dan gaya bicara adalah bentuk bahasa nonverbal yang perlu dicermati agar tercipta komunikasi yang baik dengan anggota delegasi.

“Di setiap kesempatan, dalam menyampaikan informasi harus selalu memperhatikan gaya bicara dan intonasi,” ujar Valerie, yang sehari-hari bertugas di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM.

Alasan para LO terlibat di event AMEM-41 bermacam-macam. Ilham Pramuwijaya, LO untuk ASCOPE, menyampaikan alasannya menjadi LO di acara ini.

“Untuk mengukur dan membandingkan secara langsung kualitas Indonesia dengan negara ASEAN lainnya dengan berhadapan langsung dengan delegasi,” kata Ilham menjelaskan.

Selain tantangan ada juga harapan para LO di AMEM-41. Seperti Asep yang berharap LO AMEM-41 bisa mengantarkan dirinya menjadi delegasi Indonesia di pertemuan-pertemuan tinggi internasional.



Kesuksesan penyelenggaraan The 41st ASEAN Ministries on Energy Meeting (AMEM-41) tidak lepas dari peran serta Liaison Officer (LO) yang bekerja mendampingi para delegasi sepanjang acara ini digelar, (16/08/2023).

“Suatu saat bisa menjadi salah satu delegasi Kementerian ESDM di forum internasional, ETWG-ETMM G20; SOE-AMEM ASEAN; APEC dan forum internasional lainnya,” ujar Asep.



Senada, Hanan menyampaikan kalau pengalamannya menjadi LO ini adalah ikhtiarnya untuk dapat lebih lagi mengatur waktu dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggrisnya.

“Semoga jadi belajar banyak, gimana cara manajemen dan bagi waktu, gimana organize sesuatu, memberikan kesan yang baik bagi tamu, skill bahasa inggris meningkat, dan memberikan manfaat bagi banyak orang,” pungkas Hanan. (RO)

Kementerian ESDM Apresiasi PLN NP Dalam Mewujudkan Transisi Energi Melalui Pengelolaan Pembangkit EBT



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Nusantara Power Connect 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (11/09/2023).

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengapresiasi PLN Nusantara Power sebagai badan usaha ketenagalistrikan yang terus bertransformasi dalam menyediakan tenaga listrik yang lebih bersih dan berkelanjutan demi mewujudkan transisi energi melalui pengelolaan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang mewakili Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Nusantara Power Connect 2023 di Jakarta Convention Center, Senin (11/09/2023).

"Hal ini dapat kita lihat dari beberapa proyek pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan diantaranya PLTS Terapung Cirata, PLTS di Kalimantan Timur, PLTS Terapung Waduk Karangates, dan PLTA Mamberamo," ujar Jisman.

Jisman menyampaikan bahwa pemerintah mengatur pengelolaan penyediaan tenaga listrik berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kewenangan penyelenggaraannya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai ketahanan energi, yaitu suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, yang dapat diakses masyarakat dengan harga yang

terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

"Mencapai ketahanan energi nasional adalah prioritas utama bagi semua negara, termasuk Indonesia. Namun, tantangan transisi energi menjadi



fokus penting dalam rangka mengatasi perubahan iklim global,” ungkap Jisman.

Pemerintah, melalui Net Zero Emission Road Map berupaya untuk memproyeksikan subsektor ketenagalistrikan khususnya pembangkitan tenaga listrik untuk dapat bertransisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dalam rangka mencapai zero emission pada 2060 bahkan lebih awal. Untuk itu Kementerian ESDM sangat mendorong transisi energi berjalan lebih cepat.

Dari sisi kebijakan, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mendorong transisi energi sesuai dengan roadmap salah satunya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan investasi EBT, mempercepat pencapaian EBT dalam bauran energi nasional, mengurangi Gas Rumah Kaca, dan mengurangi defisit neraca berjalan di sektor energi.

Jisman menyampaikan bahwa upaya pemerintah dalam transisi energi, salah satunya melalui penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) lebih hijau dari RUPTL sebelumnya, serta

penyelarasan dengan Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

“Pemerintah tidak bisa sendirian, transisi energi membutuhkan kolaborasi semua pihak termasuk pengusaha, ketika nantinya revisi RUPTL akan kita umumkan. Kami akan segera melakukan diseminasi terhadap revisi RUKN dan RUPTL agar dapat cepat dieksekusi,” ujar Jisman.

Ia juga menyampaikan terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan transisi energi tersebut mulai dari persoalan infrastruktur energi, teknologi, dan pembiayaan. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi semua pihak demi mewujudkan cita-cita transisi energi dan berbagai tantangan yang lebih kompleks.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama PT PLN (Persero) mengatakan bahwa PT PLN (Persero) melakukan segala upaya untuk meningkatkan proses transisi energi, salah satunya dengan mengeluarkan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga batu bara dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) dan membatalkan kontrak 1,3 gigawatt PLTU batu bara.

“Upaya tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan

menjadi pemimpin dalam mengurangi perubahan iklim,” ujar Darmawan.

PLN juga merencanakan dan mengembangkan 21 gigawatt pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam The Greenest rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2019-2028. Darmawan mengatakan, rancangan RUPTL merupakan yang paling hijau dalam sejarah PLN dan Indonesia.

“Ini yang paling hijau dalam sejarah PLN dan juga dalam sejarah Indonesia yaitu 51,6 persen penambahan kapasitasnya berbasis pada EBT,” kata Darmawan.

Nusantara Power Connect

Nusantara Power Connect 2023 (NP Connect 2023) digelar di Jakarta Convention Center, pada 11-12 September 2023. Gelaran ini adalah event tahunan PLN Nusantara Power dan merupakan event ke-8 yang menghadirkan 113 perusahaan, 177 booth, 20 sesi konferensi, serta 55 pembicara yang diikuti oleh 8 negara dari Indonesia, India, Jepang, Singapura, Austria, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan China. Gelaran ini akan menjadi epicentrum diskusi perkembangan industri ketenagalistrikan di Indonesia. (AT)

“Setidaknya terdapat empat indikator prioritas pada subsektor ketenagalistrikan, yaitu Rasio Elektrifikasi dengan capaian sebesar 99,70%, subsidi listrik tepat sasaran yang telah terealisasi sebesar Rp37,20 triliun, peningkatan nyala 24 jam/hari saat ini sebanyak 129 sistem/lokasi telah menyala, dan capaian konsumsi listrik saat ini sebesar 1.182 kWh/Kapita,” Jisman menjelaskan.

Lebih lanjut, Jisman menjelaskan indikator lainnya terkait infrastruktur pasokan energi. Pada tahun 2023, target peningkatan infrastruktur pembangkit sebesar 5.511 MW, gardu induk sebesar 3.900 MVA, dan transmisi sebesar 3.519 kms. Ia menyampaikan pengembangan transmisi mengikuti penambahan kapasitas pembangkit yang akan dievakuasi.

Ia lantas menuturkan beberapa indikator kinerja terkait peningkatan akses, perlindungan sosial, teknik dan lingkungan memiliki progres yang masih sesuai dengan target. Jisman menyebut indikator tersebut di antaranya adalah jumlah pelanggan listrik dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi, penurunan emisi CO₂, infrastruktur charging station untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik, serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pembangkitan.

Supergrid juga menjadi bahasan dalam pengenalan program-program ketenagalistrikan bagi ASN muda Kementerian ESDM. Supergrid merupakan faktor kunci untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) di sektor tenaga listrik.

“Kita berencana membangun supergrid. Ketika nanti terbangun akan menghubungkan empat pulau besar. Untuk kebutuhan investasinya total sebesar 1.039 miliar USD,” ujarnya.

Transisi Energi Menjadi Perhatian

Rini Rosmini dari BPH Migas yang mengikuti acara tersebut mengatakan ia mendapat banyak manfaat dari sharing session oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.

“Banyak banget manfaatnya, kita jadi tahu tentang target NZE yang tadi dipaparkan Pak Dirjen. Jadi sebenarnya masih banyak PR yang perlu kita lakukan menuju NZE di tahun 2060, salah satunya tadi terkait regulasi PLTS Atap untuk rumah tangga untuk mendukung transisi energi,” tuturnya.

Senada, Arya dari Badan Geologi juga menyebut transisi energi menjadi topik yang paling mendapatkan perhatiannya.

“Terkait transisi energi menuju NZE tahun 2060, ESDM berusaha ke arah sana. Beberapa hal yang dilakukan di antaranya mengganti energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT), pengurangan emisi karbon juga dilakukan salah satunya melalui carbon capture storage (CCS),” ujar Arya.

Ia mendukung acara ini dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, banyak manfaat yang bisa didapat dari kegiatan ini.

“Sangat perlu diadakan acara ini. Jujur kalau tidak sharing ini mungkin awareness kami terhadap isu-isu yang sifatnya sektoral pasti kurang,” kata Arya.

Pelatihan untuk ASN angkatan 2022 ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ESDM yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Kementerian ESDM khususnya bagi PNS baru. Diharapkan mereka memiliki kompetensi teknis sehingga mampu menjelaskan isu strategis, kebijakan, jenis, dan tahapan kegiatan pada sektor ESDM sebagai ilmu dasar bagi PNS ESDM. Kegiatan ini terbagi menjadi dua batch, yakni batch 1 pada 22 Agustus-15 September 2023 dan batch 2 pada 2 Oktober-27 Oktober 2023. (AMH)



25 Tahun MKI



PEMERINTAH HARAPKAN KONTRIBUSI AKTIF DALAM TRANSISI ENERGI

"Dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai pencapaian yang luar biasa dalam menjaga lingkungan, mempromosikan keberlanjutan, dan mencapai tujuan nasional kita demi membentuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk Indonesia."

Ida Nuryatin Finahari
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan



Ida Nuryatin Finahari dalam acara Talk Show peringatan Hari Ulang Tahun Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) ke-25 "Reshaping, Refocusing and Empowering MKI for The Next Journey" di Jakarta, Minggu, (03/09/2023).

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) sebagai organisasi stakeholder di subsektor ketenagalistrikan Indonesia memasuki usia 25 tahun sejak dibentuk dan didirikan pada 1998. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap MKI dapat berkontribusi secara aktif dalam menjalankan transisi energi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ida Nuryatin Finahari dalam acara Talk Show peringatan Hari Ulang Tahun Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) ke-25 "Reshaping, Refocusing and Empowering MKI for The Next Journey" di Jakarta, Minggu, (03/09/2023).

"Kementerian ESDM mengharapkan agar MKI sebagai wadah stakeholder ketenagalistrikan Indonesia berkontribusi secara aktif melalui pemikiran, keahlian, dan keterampilannya dalam menjalankan transisi energi yang sangat krusial ini," ungkap Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa dalam mencapai target transisi energi, pemerintah membutuhkan kolaborasi antara semua pihak.

“Secara global kita dituntut untuk semuanya menuju Net Zero Emission, ini merupakan tanggung jawab dan konsekuensi global menjalankan transisi energi kedepannya. Komitmen pemerintah dalam transisi energi ini adalah melalui kolaborasi, poinnya kolaborasi,” jelas Ida.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PLN (Persero) selaku Ketua Dewan Pengawas MKI Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa dalam memerangi perubahan iklim tidak bisa dijalani sendiri harus kolaborasi. Ia pun menjelaskan bahwa dalam mengejar transisi energi bukan hanya sekedar mengejar target namun demi masa depan yang lebih baik.

“Kita harus mampu mengurangi emisi gas rumah kaca, kita harus berbicara bagaimana anak cucu kita nanti kedepan. Why are we doing this? Because we do really care, karena masa depan harus punya yang lebih baik daripada kita saat ini. Disinilah MKI punya peranan yang sangat penting,” ujar Darmawan.

Kementerian ESDM percaya dengan kerjasama dan komitmen bersama dapat mencapai keberlanjutan energi yang lebih baik di Indonesia.

“Dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai pencapaian yang luar biasa dalam menjaga lingkungan, mempromosikan keberlanjutan, dan mencapai tujuan nasional kita demi membentuk masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan untuk Indonesia,” tutup Ida.



25 Tahun MKI

MKI adalah organisasi stakeholder yang bergerak dalam kegiatan pembentukan forum untuk menghasilkan pemikiran guna menumbuh-kembangkan industri ketenagalistrikan di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada 3 September 2023, MKI memasuki usianya yang ke 25 tahun sejak dibentuk dan didirikan sejak tahun 1998. MKI berupaya mengembangkan suatu landasan yang luas dan terpadu dari rancangan umum ketenagalistrikan nasional melalui masukan, pendapat dan pandangan dari masyarakat dan industri kepada Pemerintah Indonesia.

Ketua Umum MKI Evy Haryadi menyampaikan bahwa MKI berperan dalam memberi masukan kepada pemerintah dalam menjawab tantangan transisi energi. “Penting bagi MKI mengambil peran dalam hal memberi masukan2 terkait transisi energi kepada pemerintah. Kami perlu mengembangkan organisasi MKI untuk memberikan masukan kepada pemerintah, bagaimana kita bisa menjawab tantangan transisi energi kedepan,” kata Evy. (U)



DITJEN GATRIK TEKANKAN ENERGI BERSIH PADA KUNKER SPESIFIK KOMISI VII — KE PLTU SURALAYA —



Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya menyediakan tenaga listrik yang ramah lingkungan, hal ini ditunjukkan dengan penyusunan perubahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang mengutamakan pembangkit berbasis EBT dan turut mendukung tercapainya Net Zero Emission di tahun 2060.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten, Jumat, (01/09/2023).

“Penyediaan energi bersih dapat dilihat dari emisi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbasis fosil. Salah satu indikatornya mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 15 Tahun 2019 tentang baku mutu emisi pembangkit listrik termal,” ungkap Wanhar.

Wanhar menjelaskan sejak tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memperketat baku mutu emisi dengan nilai konsentrasi parameter SO₂ dan NO_x sebesar 200 mg/Nm³, konsentrasi parameter PM sebesar 50 mg/Nm³ dan konsentrasi Hg sebesar 0,03 mg/Nm³.

“Indonesia terus berupaya untuk menerapkan baku mutu emisi yang lebih baik agar dapat bersaing dengan negara-negara yang sudah menerapkan baku mutu emisi (parameter SO₂, NO_x, Partikulat dan Merkuri (Hg)) untuk PLTU yang lebih ketat seperti China, Amerika Serikat dan Jepang,” jelas Wanhar.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa kunker ini dilakukan dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan sesuai Amanat UUD 1945, dan pada hari ini dilakukan



Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Cilegon, Banten, Jumat, (01/09/2023).

terkait implementasi teknologi PLTU yang lebih ramah lingkungan sesuai dengan standar Environmental Social Governance (ESG).

“Kualitas udara di Jakarta sedang memburuk akibat polusi udara dan menjadi perbincangan publik. Polusi udara berpotensi membuat warga terserang penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dimana puncaknya kualitas udara Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terkontaminasi di dunia” tegas Sugeng.

Sugeng juga menyampaikan bahwa salah satu sektor yang sorot terkait dengan parahnya polusi udara yang terjadi di Jakarta adalah sektor energi yakni keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menurutnya, PLTU perlu melakukan banyak inovasi dalam menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan sehingga bisa bersinergi dengan energi terbarukan dalam mencapai target Net Zero Emission di Tahun 2060.

“Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Komisi VII DPR RI ingin berdiskusi dan meninjau secara langsung terkait profil dan kinerja PLTU Suralaya dalam pemenuhan energi listrik bagi masyarakat. Tentunya Komisi VII DPR juga ingin mengetahui langkah-langkah perusahaan dalam menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan, serta implementasi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) yang telah diterapkan perusahaan,” imbuh Sugeng.

PLTU Suralaya

Kunjungan Kerja di PLTU Suralaya ini diikuti oleh Komisi VII DPR RI, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direksi PT PLN (Persero) dan Direksi PT Indonesia Power (IP).

Tergolong PLTU berbahan bakar batubara tertua di Indonesia (berumur sekitar 36 tahun), PLTU Suralaya merupakan salah satu PLTU terbesar di Indonesia yang memproduksi sekitar 50% dari total produksi PT Indonesia Power dan berkontribusi sekitar 18% dari energi listrik kebutuhan Jawa-Bali. Dengan transmisi sebesar 500 kV, pembangkit tersebut mengonsumsi batubara kurang lebih 35.000 ton per hari.

Direktur Utama PT Indonesia Power, Edwin Nugraha Putra menyampaikan bahwa pihaknya dan PT PLN (Persero) berkomitmen untuk selalu menjaga emisi PLTU sesuai dengan regulasi. “PLN telah menetapkan standar pemasangan ESP pada setiap PLTU sehingga emisi yang dikeluarkan oleh PLTU selalu aman dan berada dibawah ambang batas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai Permen LHK no. 15 tahun 2019, ambang batas partikulat adalah 100 mg/m³, sedangkan hasil pengukuran partikulat di Suralaya di bawah 60 mg/m³” ungkap Edwin.

Edwin menjelaskan bahwa saat ini PLTU Suralaya berhasil meraih dua penghargaan Asean Energy Award 2023 pada kategori Combine Cycle Thermal (CCT) Utilisation for Power Generation dan implementasi Biomassa, hal ini menunjukkan bahwa PLN dalam menjalankan operasional pembangkit sangat patuh terhadap prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG).

Dalam kesempatan yang sama Direktur Manajemen Pembangkitan PT PLN

(Persero), Adi Lumakso menyampaikan bahwa untuk mengendalikan polusi udara di Jakarta, PLN berkomitmen menonaktifkan PLTU dengan kapasitas hingga 1,6 GW selama masa KTT.

“PLN akan melakukan transisi energi diantaranya di sisi Sektor Hulu Ketenagalistrikan (Pembangkit), untuk dapat Net Zero Emission di Tahun 2060” jelas Adi.

Hadir juga ditempat yang sama Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, Prof Puji Lestari yang menyampaikan telah melakukan kajian dampak kegiatan PLTU PT PLN Indonesia Power terhadap potensi polutan lintas batas dengan model dispersi pada tanggal 1-22 Agustus 2023.

“Kesimpulan yang kami dapat dalam kajian tersebut antara lain, terdapat transboundary Air Pollutant (polutan Lintas Batas) terutama pada musim penghujan namun pada konsentrasi yang relatif kecil pada Jakarta, dimana pada musim kemarau tidak terjadi transboundary kearah Jakarta, konsentrasi polutan pada bulan agustus 2023 cenderung kecil dan tidak terjadi transboundary ke arah Jakarta baik untuk polutan PM_{2.5}; NO_x dan SO₂,” jelas Puji.

Dalam upaya tekankan Energi Bersih, Pemerintah sangat mendukung usaha PT PLN (Persero) tersebut dalam pengembangan pembangkit listrik dengan energi bersih dan ramah lingkungan.

“Pelaksanaan kunjungan kerja di PLTU Suralaya untuk melihat langsung bagaimana kondisi penyediaan listrik pembangkit berbasis fosil dan sebagai pertimbangan dalam menyusun kebijakan ketenagalistrikan yang lebih ramah lingkungan,” pungkas Wanhar. (RA/RO)

DUKUNG PENGEMBANGAN TRANSISI ENERGI, DITJEN GATRIK GELAR bedah paper

Indonesia adalah negara kepulauan dengan dikelilingi oleh perairan dan karena berada di negara tropis maka Indonesia juga memiliki potensi energi surya yang besar. Untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkomitmen memanfaatkan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Indonesia sebagai sumber energi andalan di masa depan. Salah satu aksi nyata yang dilakukan adalah mempercepat pengembangan EBT untuk peningkatan penyediaan energi listrik maupun non-listrik.

Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyelenggarakan Bedah Paper "Global Atlas of Marine Floating Solar PV Potential" pada Kamis, (31/08/2023). Kegiatan Acara Bedah Paper ini merupakan bagian dari forum literasi informasi di bidang ketenagalistrikan yang rutin diselenggarakan oleh Perpustakaan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, dan ini adalah acara Bedah Paper pertama di tahun 2023.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari dalam pembukaan acara tersebut menyampaikan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar, menambah wawasan, serta peningkatan kemampuan public speaking pegawai.

”

"Adanya Acara Bedah Paper ini merupakan sarana berbagi pengetahuan dari pegawai Ditjen Ketenagalistrikan melalui karya tulis yang telah dipublikasikan. Selain itu, melalui acara ini Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan ingin mengajak para pegawai dan masyarakat umum untuk meningkatkan literasi, informasi, serta sarana pengetahuan di bidang Ketenagalistrikan."

IDA NURYATIN FINAHARI

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari membuka acara Bedah Paper "Global Atlas of Marine Floating Solar PV Potential" pada Kamis, di Jakarta (31/08/2023).

“Adanya Acara Bedah Paper ini merupakan sarana berbagi pengetahuan dari pegawai Ditjen Ketenagalistrikan melalui karya tulis yang telah dipublikasikan. Selain itu, melalui acara ini Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan ingin mengajak para pegawai dan masyarakat umum untuk meningkatkan literasi, informasi, serta sarana pengetahuan di bidang Ketenagalistrikan,” Jelas Ida.

Ida menyampaikan paper yang akan dibedah pada acara hari ini berjudul: “Global Atlas of Marine Floating Solar PV Potential”. Karya tulis ini membahas tentang potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung. Paper ini merupakan karya tulis bersama dari David Firnando Silalahi dan rekannya, Andrew Blakers. Saudara David Firnando Silalahi sendiri merupakan ASN Ditjen Ketenagalistrikan yang sedang menimba ilmu di Australian National University sebagai Candidate PhD in Solar Energy.

“Paper ini secara ringkas membahas mengenai PLTS Terapung di laut Khatulistiwa yang tenang. PLTS Terapung ini dapat menyediakan energi surya ‘tak terbatas’ secara efektif untuk negara-negara berpenduduk padat di Asia Tenggara dan Afrika Barat,” imbuh Ida.

Narasumber dalam bedah paper hari ini ASN Ditjen Ketenagalistrikan yang sedang menimba ilmu di Australian National University sebagai Candidate PhD in Solar Energy, David Firnando Silalahi menyampaikan bahwa pengembangan Marine Floating Solar PV memiliki peranan penting dalam transisi energi menuju 100% renewable energy future, untuk mencapai target net zero emission sekaligus memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik yang terus meningkat.

“Untuk melihat potensi wilayah laut mana yang cocok untuk pengembangan PLTS terapung lepas pantai (Offshore Floating Solar PV) perlu mempertimbangkan beberapa hal diantaranya kecepatan angin, ketinggian gelombang, selain itu perlu dipertimbangkan apakah termasuk kawasan konservasi, dan pertimbangan teritorial,” ujar David.

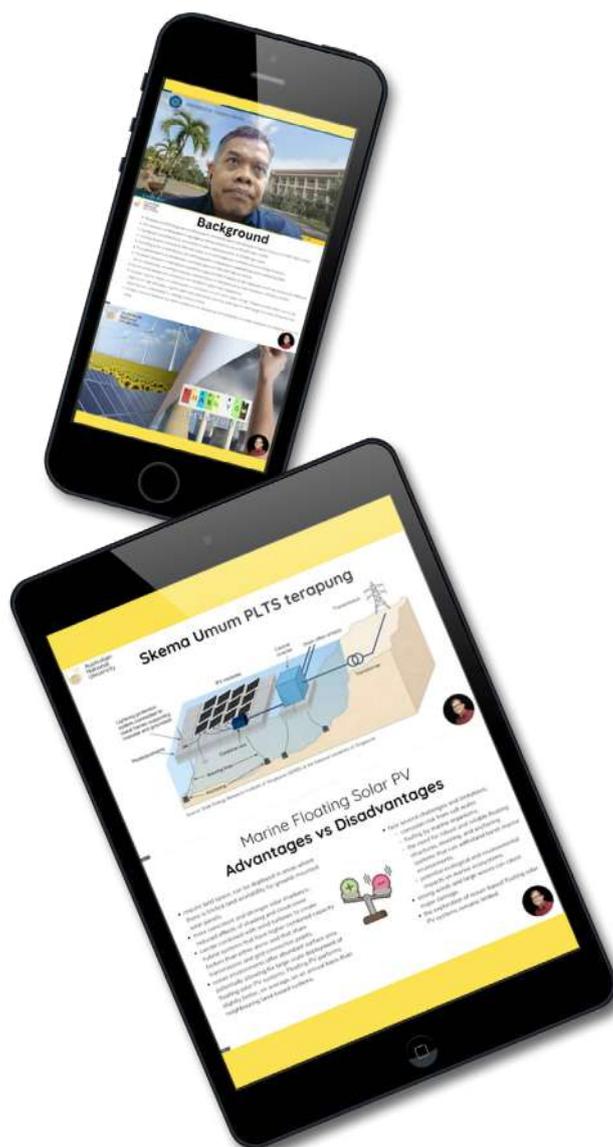
David menyampaikan wilayah yang memiliki prospek paling bagus berada (pada 5–12 derajat) garis lintang khatulistiwa, termasuk wilayah perairan Indonesia, dan beberapa wilayah di Afrika, yang memiliki karakteristik perairan yang tenang, dengan ketinggian gelombang kurang dari 6m dan kecepatan angin kurang dari 15m/s, yang mana kurang cocok untuk pengembangan off-shore wind farm, sehingga off-shore floating Solar PV ini bisa menjadi alternatif.

“Untuk saat ini harga PLTS terapung masih lebih tinggi, 10 – 20 % dari PLTS biasa, tapi ada kota atau negara yang memang

harus menggunakan PLTS terapung, karena terkendala kurangnya lahan, namun tetap harus memperhatikan instalasinya apakah akan aman dalam 20 tahun kedepan sesuai dengan keekonomiannya lebih ekonomis,” jelas David.

Mewakili pimpinan Ditjen Ketenagalistrikan, Ida mendukung dan mengapresiasi pengemasan bedah paper ini. Ia berharap kegiatan ini dapat terus dilanjutkan sebagai sarana pengembangan kompetensi para peserta diskusi dan diharapkan mendapatkan gambaran sekaligus menambah wawasan terkait pengembangan transisi energi di Indonesia utamanya terkait PLTS Terapung.

“Semoga webinar ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan terkait pengembangan transisi energi di Indonesia. Selamat berdiskusi, semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” tutup Ida. (RA)





PROGRAM BPBL 2023

SASAR RUMAH TANGGA 900 VA

Kementerian ESDM khususnya Ditjen Ketenagalistrikan bersama DPR RI terus mendukung upaya Pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi listrik bagi masyarakat tidak mampu. Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan bantuan bagi rumah tangga miskin dan tidak mampu untuk mendapatkan akses listrik dengan tarif yang terjangkau. Agar tepat sasaran, kebijakan ini diberikan kepada rumah tangga dengan daya 900 VA yang masuk dalam DTKS, berdomisili di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan terluar) dan/atau tervalidasi oleh kepala desa/ lurah atau pejabat yang setara.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Havidh Nazif dalam acara Inspirasi Pagi dengan tema “Program BPBL dan Kebijakan Tarif & Subsidi Listrik” di TV One, Jakarta, Selasa (29/08/2023).

“Kita bisa mengetahui bagaimana rumah tangga tadi dikategorikan kategori mampu atau tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, sehingga itu menjadi basis kita menetapkan bahwa ini masuk ke dalam golongan bersubsidi,” ujar Havidh.

Pada saat yang bersamaan EVP Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT. PLN (Persero) Tony Bellamy juga menyampaikan bahwa untuk menjangkau rumah tangga tidak mampu belum berlistrik, Pemerintah memberikan penugasan kepada PLN untuk pemeratakan akses listrik ke seluruh wilayah Indonesia melalui BPBL.

“PLN itu diberikan mandat untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat secara keseharian dan merata nah ini tentunya secara berkesinambungan dan terus menerus, PLN terus untuk melaksanakan operasional, untuk melakukan penarikan infrastruktur ketenagalistrikan sampai dengan pelosok,” ujar Tony.

Tony lebih jauh menjelaskan bahwa mengacu kepada Permen ESDM Nomor 29 tahun 2016 dimana pelanggan rumah tangga yang mendapatkan subsidi adalah Pelanggan Rumah Tangga dengan kapasitas daya 450 VA dan 900 VA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Pelanggan rumah tangga yang dayanya 450 sampai 900 VA, nah ini pelanggan kategori yang tidak mampu inilah yang berdasarkan data penetapan

Kementerian Sosial Republik Indonesia, kami diberi tugas oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk melakukan BPBL,” ujar Tony.

Havidh juga menerangkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 ayat 3 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Juga Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran diberlakukan sejak tahun 2017.

“Bagaimana keterlibatan Negara ini, Pemerintah ini untuk tadi membangun akses infrastruktur, salah satunya termasuk listrik,” ujar Havidh.

Untuk tarif listrik bersubsidi di tingkat negara-negara Asean, Havidh mengatakan bahwa saat ini untuk tarif listrik rumah tangga di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara Asean lainnya dan berkompetitif dengan Malaysia dan Thailand.

“Masyarakat kita sedang menikmati tarif listrik terendah di ASEAN, kalau yang sudah mendapatkan subsidi”, ujar Havidh.

Havidh Berharap BPBL dapat bermanfaat sehingga masyarakat dapat menikmati listrik untuk kebutuhan sehari-hari, penerangan, komunikasi, televisi, pendidikan dan untuk kegiatan ekonomi mikro sehingga menjadi pemicu peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kita akan mendorong bagaimana masyarakat itu menggunakan listrik, karena sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok, ke depannya adalah bagaimana dia tadi menggunakan pompa, terus kemudian rice cooker, dan segala macam, sehingga tadi lebih bersih dan akan meningkatkan konsumsi listrik perkapita kita,” pungkas Havidh.



PIMPIN UPACARA HUT RI KE-78,

DIRJEN GATRIK TEKANKAN TARGET NET ZERO EMISSIONS 2060 SEBAGAI UPAYA INDONESIA MENJADI NEGARA MAJU DI TAHUN 2045

“Komitmen Indonesia menuju net zero emissions tahun 2060 merupakan sebagian dari transformasi yang diperlukan dalam upaya menjadi Negara maju di tahun 2045.”

JISMAN HUTAJULU
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam amanat Pembina Upacara Bendera HUT RI ke-78 di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta, Kamis (17/08/2023).

Pemerintah terus mencanangkan keberlangsungan transformasi energi dalam rangka mitigasi dampak gas rumah kaca. Salah satu upayanya adalah dengan mengajak setiap elemen bangsa terlibat dan berkolaborasi untuk mewujudkan keberhasilan Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam amanat Pembina Upacara Bendera HUT RI ke-78 di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan Jakarta, Kamis (17/08/2023).

“Komitmen Indonesia menuju net zero emissions tahun 2060 merupakan sebagian dari transformasi yang diperlukan dalam upaya menjadi Negara maju di tahun 2045,” ujar Jisman.

Jisman kemudian menyampaikan bahwa upaya untuk mencapai kondisi tersebut adalah dengan usaha

Tberkesinambungan yang meliputi diversifikasi ekonomi dari konsentrasi sumber daya alam, pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia yang didorong oleh pengetahuan, teknologi dan inovasi, serta dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif pada berbagai rantai nilai energi bersih.

Upaya bersama dalam mencapai cita-cita Negara maju, menurut Jisman adalah dengan melanjutkan perjuangan dan pembangunan Bangsa, serta berkolaborasi bersama mewujudkan Indonesia maju.

“Ini adalah momentum yang memberikan energi gerak untuk bangsa Indonesia, agar terus melaju. Ada semangat perjuangan sebagai energi gerak yang progresif. Gagasan gotong royong dan rasa tanggung jawab bersama telah menjadi aspirasi untuk memajukan kesejahteraan rakyat,” ungkap Jisman selaku Pembina Upacara.



Jisman juga menyampaikan bahwa dalam hal mewujudkan Indonesia Maju di Sektor ESDM akan selalu ada tantangan yang dihadapi. Untuk itu di setiap sektor harus berbenah dan berinovasi.

“Masih banyak lagi tantangan dan permasalahan bangsa ini yang harus kita selesaikan. Perlu suatu lompatan inovasi birokrasi dalam menyelesaikan segala permasalahan di sektor ini. Paradigma pengelolaan energi dan sumber daya mineral telah mengalami perubahan yang semula sebagai sumber pendapatan Negara, sekarang menjadi penggerak perekonomian Negara,” ujar Jisman

Jisman juga mengimbau agar seluruh pegawai Kementerian ESDM untuk lebih kompetitif, berintegritas, serta bekerja untuk kemakmuran rakyat dalam menghadapi persaingan global.

“Saya meminta kepada seluruh pegawai Kementerian ESDM untuk bekerja dengan lebih efektif, dan mewujudkan efisiensi serta tetap optimis dalam memandang masa depan. Kita harus tetap solid dalam bekerja.”

Jisman berharap agar seluruh pegawai dapat terus mengamalkan nilai-nilai (values) yang dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK).

“Saya harap nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi slogan bagi Saudara-saudara sekalian namun dapat diwujudkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN Kementerian ESDM,” pungkas Jisman. (RO)



PEMERATAAN AKSES LISTRIK MELALUI PROGRAM BPBL YANG AMAN, ANDAL DAN LAIK OPERASI

Pemerintah terus memberikan perhatian bagi keberlangsungan pemerataan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Bersama Komisi VII DPR RI, Pemerintah melalui Ditjen Ketenagalistrikan memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini merupakan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho pada acara talkshow bertajuk 'Bantuan Pasang Baru Listrik dan Keselamatan Ketenagalistrikan' di iNews TV Jakarta, Selasa, (15/08/2023).

"Pemerintah melalui Undang-Undang 30 itu diberikan kewajiban untuk membantu, membantu untuk Rumah Tangga yang tidak beruntung ini dengan caranya apa, dengan caranya memberikan bantuan pasang baru listrik, nah ini yang kami kerjakan dimulai tahun 2022 sampai sekarang ini sudah berjalan," kata Nugroho.

Nugroho menambahkan BPBL juga memberikan perhatian bagi keselamatan masyarakat dalam mengakses listrik, dimana karena ketidakmampuan memasang listrik berbayar,

masyarakat memiliki kebiasaan menyambung dengan menumpang dari tetangga atau keluarga yang sudah berlistrik. Untuk itu BPBL hadir untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat dalam penggunaan listrik.

"Manakala dia menumpang dari tetangga itu bisa jadi bahaya, jadi selain aman, harus andal, amannya itu yang harus benar-benar diperhatikan," ujar Nugroho.

Untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi pengguna listrik, Pemerintah juga melibatkan Asosiasi Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah (ASLITER) dalam menjalankan BPBL ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua ASLITER Pahala Lingga.

"Bahwa pekerjaan (BPBL) ini selesai dan berfungsi adalah berdasarkan hasil daripada terakhirnya adalah sertifikat laik operasi yang diberikan oleh lembaga inspeksi teknik," ujar Pahala.

Selain mendapatkan Instalasi listrik, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan biaya pemeriksaan instalasi dan penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang akan menjamin keselamatan listrik penggunaannya.

“Manakala dia menumpang dari tetangga itu bisa jadi bahaya, jadi selain aman, harus andal, amannya itu yang harus benar-benar diperhatikan.”

M.P. Dwinugroho

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM



Seperti dijelaskan Nugroho, SLO merupakan suatu instalasi tenaga listrik yang telah berfungsi dan dinyatakan siap dioperasikan sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan (laik operasi).

“Setiap rumah atau instalasi yang sudah terpasang listrik itu harus diuji melalui SLO, kita test apa itu aman, andal, bisa digunakan, kalau itu udah aman, andal, itu bisa lulus dan bisa digunakan, nanti kita kasih sertifikat laik operasi, dan itu wajib di setiap rumah tangga,” kata Nugroho.



Menurut Nugroho secara teknis pemasangan sambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik pada BPBL dilakukan oleh petugas yang sudah memiliki sertifikat kompetensi tenaga teknik.

“Yang memasang pun harus mempunyai sertifikat kompetensi tenaga teknik jadi nggak sembarangan orang memasang, seperti teman-teman di ASLITER ini nggak boleh nggak punya, kalo nggak, ada sanksinya nanti, sanksi bagi lembaga,” ujar Dwi. (RO)

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho dan Ketua ASLITER Pahala Lingga pada acara talkshow bertajuk ‘Bantuan Pasang Baru Listrik dan Keselamatan Ketenagalistrikan’ di iNews TV Jakarta, Selasa, (15/08/2023).

PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENINGKATAN INVESTASI KETENAGALISTRIKAN

“Secara bersama-sama diharapkan kita dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bersama-sama membangun investasi ketenagalistrikan di Indonesia.”

Ida Nuryatin Finahari
Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya untuk melakukan penyederhanaan perizinan yang dapat berdampak secara langsung pada kemudahan kegiatan usaha dan peningkatan investasi di bidang ketenagalistrikan. Pada pelaksanaannya, dilakukan kepastian pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam rangka memudahkan perizinan berusaha tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari saat membuka Forum Dialog Isu-isu Strategis “Pembagian Peran Pusat dan Daerah untuk Wujudkan Subsektor



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari membuka Forum Dialog Isu-isu Strategis “Pembagian Peran Pusat dan Daerah untuk Wujudkan Subsektor Ketenagalistrikan yang Adaptif dan Inovatif Seri I” di Balikpapan, Senin (14/8/2023).

Ketenagalistrikan yang Adaptif dan Inovatif Seri I” di Balikpapan, Senin (14/8/2023).

“Secara bersama-sama diharapkan kita dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam bersama-sama membangun investasi ketenagalistrikan di Indonesia,” ungkap Ida.

Lebih lanjut Ida menjelaskan bahwa pokok pengaturan subsektor ketenagalistrikan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah terkait penyederhanaan dan kemudahan izin usaha di bidang ketenagalistrikan menjadi perizinan berusaha mengikuti risiko kegiatan usaha.

“Selain itu juga diatur mengenai kewenangan di bidang ketenagalistrikan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelas Ida.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan Ferry Triansyah menyampaikan mengenai pembagian kewenangan perizinan berusaha ketenagalistrikan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



“Jadi untuk wilus (Wilayah Usaha) itu memang tidak ada penetapan untuk gubernur ya, tapi yang izinya oleh gubernur adalah izin untuk distribusi dan penjualannya. Dan untuk tarif wilus tetap ditetapkan untuk menteri, tapi jika ada IPP (Independent Power Producer) wilusnya distribusi dan penjualan yang non lintas provinsi, itu izinya oleh pemerintah daerah,” kata Ferry.

Koordinator Usaha Penunjang Ketenagalistrikan Didit Waskito dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah harus juga disosialisasikan kepada pemohon perizinan.

“Masih ada pengajuan perizinan yang tidak bisa diproses di kami, misalnya pengoperasian pembangkit itu lokasinya di Jakarta, ya itu kewenangan Pemda (Pemerintah Daerah). Ini menjadi catatan penting ya bapak ibu agar disampaikan kepada pemohon bahwa ada pembagian kewenangan disitu,” ujar Didit.



Kewenangan Perizinan Pemerintah Daerah

Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur Mashur Sudarsono Wira Adi menyampaikan bahwa kewenangan perizinan subsektor ketenagalistrikan di Kalimantan Timur sudah dilaksanakan sesuai regulasi.

“Untuk izin-izin kami ada IUJP (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik), kami yang 500 kW tadi. Kemudian untuk yang IUPTLS-nya (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri) ini di 500 kW sampai 10 MW,” ujar Mashur.

Mashur juga menyampaikan usulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai peningkatan kewenangan pemerintah daerah dan pengawasan bersama terkait subsektor ketenagalistrikan.

“Kalau bisa sih suatu saat itu pengawasan bisa bersama-sama

antara inspektur listriknya di pusat sama di daerah. Saya dengar itu kalau di pusat (mendapatkan) pembelajaran dari Inggris (belajar dari ahli yang berpengalaman di luar negeri), jadi kita bisa bersama-sama inspeksi. Ini usulan suatu saat kedepannya siapa tau ada perubahan,” ucap Mashur.

Kementerian ESDM juga terus mendorong semua pihak khususnya pemerintah daerah agar dapat memberikan masukan untuk terus memperbaiki regulasi dan sistem perizinan berusaha ketenagalistrikan.

“Kami mendorong semua pihak dalam memberikan masukan untuk perbaikan perizinan berusaha, khususnya yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Kami juga mengundang masukan dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat, sehingga menjadi motivasi kami untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan sistem,” tutup Ida. (U)



Agustusan di Gatrik:

"Gatrik, Merdeka! Gatrik, Jaya! Gatrik, Okeeee!!!"



Suasana meriah berlangsung pagi itu di sudut jalan Rasuna Said, semarak bendera merah putih berkibar menghiasi, menambah semangat para peserta lomba Agustusan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrian (Ditjen Gatrik) dalam gegap gempita menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia.

Mengambil tema "Kebersamaan dalam

Kemerdekaan", rangkaian lomba di Ditjen Gatrik dimulai pada Jumat (11/08/2023), bertempat di area lapangan Tennis dan lapangan Badminton.

Ardo salah satu peserta dari Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrian (Dittek) mengungkapkan bahwa ada yang berbeda dalam kemeriahan

lomba tujuhbelasan kali ini.

"Acaranya berbeda dengan tahun kemarin, taun ini pertandingannya lebih ramai ya, apalagi ada joget balon, tangkap bebek." Ujar Ardo.

Sebelum berjalannya acara lomba, pagi itu seluruh pegawai Ditjen Gatrik terlebih dahulu mengikuti senam pagi. Dengan

berseragam kaos putih bertuliskan "17an Gatrik", mereka dengan penuh antusias mengikuti Instruktur Senam yang memimpin dengan atraktif.

Kehadiran Direktur Jenderal Gatrik Jisman Hutajulu dan Sekretaris Direktorat Jenderal Gatrik Ida Nuryatin Finahari menambah keseruan sesi senam.

Selain kegiatan lomba, Ditjen Gatrik juga akan menggelar pertandingan olah raga dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78. Dimas pegawai dari Dittek bahkan optimis akan menjadi juara lagi.

"Seru karena tujuhbelasan kali ini lombanya banyak, dan ini juga belum selesai sampai disini karena besok dan selasa ada futsal, badminton dan tenis meja, kami siap juara satu lagi," ujar Dimas.

Atur Strategi adalah Kunci

Selain ikut berpartisipasi mengisi hari kemerdekaan, ajang perlombaan ini juga dijadikan para peserta lomba untuk mengasah strategi mereka dalam menjuarai lomba. Hal ini seperti

dikatakan oleh Lia dari Kelompok Kerja (Pokja) Keuangan, yang meski sempat terjatuh dalam lomba Balap Karung tapi berhasil keluar sebagai juara ke-3.

"Mesti fokus dan atur strategi sih ya, jangan banyak ketawa karena energi jadi berkurang, tapi di ending lomba sempet jatuh, sakit banget," kata Lia.

Affah dari Airkon yang membawa timnya juara Lomba Estafet Air dan Tepung percaya bahwa menaruh rasa percaya dengan anggota tim juga merupakan kunci memenangkan lomba tujuhbelasan ini.

"Seru bikin deg-degan karena kita harus mengoper air dan tepung dari anggota tim paling depan sampai anggota tim yang paling akhir, untuk tingkat kesulitannya rendah yang penting saling kerjasama dan percaya antar anggota tim bahwa kita bisa mengoper air dan tepung sampai akhir dan cepat."

Begitu juga dengan Gendhis dari Pokja Keuangan yang keluar sebagai Juara Satu lomba Balap Karung. Meski sempat sakit perut, ia berhasil menyelesaikan lomba dan menjadi juara pertama.

"Kesannya capek dan sakit perut karena abis makan bakso hahaha, untuk kesulitannya mungkin susah untuk fokus karena suara MC-nya sahut-sahutan dengan suara-suara dari lomba lain." Ujar Gendhis.

Di ajang lomba HUT RI Gatrik kali ini bahkan menjadi momen pertama kali dan pengalaman tidak terlupakan, seperti yang disampaikan oleh Fitri dari Pokja Hukum.

Fitri yang berhasil Menangkap Bebek di ajang lomba Tangkap Bebek dan keluar sebagai juara pertama mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya memegang seekor bebek.

"Sangat berkesan karena baru kali ini saya secara langsung memegang bebek yang masih hidup dengan tangan saya."

Harapan Hari Kemerdekaan untuk Gatrik

Dalam sambutannya Jisman berharap ajang perlombaan di Ditjen Gatrik ini dapat mendorong rasa persatuan dan gotong royong seluruh pegawai.

"Harapannya melalui perlombaan ini, pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat menunjukkan semangat sportifitas, persatuan dan gotong royong yang telah diperlihatkan oleh para pendahulu kita dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan."

Ia juga menyempatkan merekam video bersama dengan seluruh pegawai sambil meneriakkan yel-yel, "Gatrik, Merdeka! Gatrik, Jaya! Gatrik, Okeee!!!"

Ia berharap semoga Gatrik semakin Jaya, bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi untuk memberikan fungsi pelayanan di bidang kelistrikan. (RO)



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu membuka rangkaian lomba lomba Agustusan di lingkungan Ditjen Gatrik, (11/08/2023).



Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Budiarto Hari Purnomo pada acara Talkshow "Program BPBL dan Upaya Peningkatan Ratio Elektrifikasi" di Studio Radio Trijaya Jakarta, Selasa (08/08/2023).

BANTUAN PASANG BARU LISTRIK, UPAYA MENCAPAI TARGET RASIO ELETRIFIKASI 100%

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat agar target Rasio Elektrifikasi bisa mencapai 100%. Dalam pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses listrik karena ketidakmampuan membayar biaya pasang baru listrik.

Untuk itu, Kementerian ESDM bersama

dengan Komisi VII DPR RI menjalankan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang merupakan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik.

Hal tersebut seperti disampaikan oleh Koordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Budiarto Hari Purnomo pada acara Talkshow "Program BPBL dan Upaya Peningkatan

Ratio Elektrifikasi" di Studio Radio Trijaya Jakarta, Selasa (08/08/2023).

"Meskipun daerahnya sudah terdapat jaringan listrik PLN, masih terdapat rumah tangga tidak mampu belum berlistrik yang tidak dapat melakukan penyambungan listrik kepada PLN karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi pelanggan PT PLN," ujar Hari.



Dengan latar belakang tersebut, Komisi VII DPR-RI menyetujui alokasi APBN Kementerian ESDM tahun 2022 untuk Program BPBL bagi rumah tangga tidak mampu belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia,

Lebih lanjut Hari menjelaskan bahwa sebaran penerima manfaat untuk program BPBL tahun 2023 sangat beragam bahkan di pulau Jawa. Dari data total target calon penerima BPBL yang tercatat, masih ada masyarakat belum berlistrik yang terdapat di Pulau Jawa.

"Hal ini memberikan gambaran bahwa masih banyak rumah tangga belum berlistrik yang merupakan masyarakat miskin perkotaan yang perlu menjadi perhatian juga, di samping rumah tangga tidak mampu yang berdomisili di daerah Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T)," jelas Hari.

Dalam kesempatan yang sama Vice President Penjualan PT PLN (Persero) Rudiana Nurhadian menyampaikan bahwa pihaknya mendukung

pelaksanaan program BPBL agar dapat sampai ke masyarakat dengan pemadanan alur pendataan penerima manfaat.

"Inisiasi awal (BPBL) datangnya dari Pemda dan Komisi VII (DPR RI), mereka melakukan pendataan kemudian mengirimkan data calon penerima BPBL ke Ditjen Gatrik, kemudian dari Ditjen Gatrik akan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen untuk dilakukan rekapitulasi jumlah usulannya berapa, setelah data lengkap ini baru kemudian PLN melakukan pemadanan data," kata Rudi.

Upaya Peningkatan Rasio Elektrifikasi

Dalam hal peningkatan rasio elektrifikasi, pemerintah terus berupaya menyiapkan akses listrik bagi masyarakat melalui berbagai program dan pembangunan jaringan listrik hingga ke pelosok daerah.

"Dengan membangun minigrid/ pembangkit off grid PLTS, PLTMH beserta jaringan untuk melistriki masyarakat untuk daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN," ujar

Hari. Dalam menjalankan tugas melistriki masyarakat, PLN dihadapkan berbagai tantangan dalam pemerataan akses listrik kepada seluruh masyarakat. Rudi menyampaikan lokasi-lokasi 3T tidak mudah secara geografis karena daerah-daerahnya terpencil, cuaca kadang ekstrim, jalanan menantang, serta akses infrastruktur jalan yang belum begitu baik.

"Jadi sebetulnya bagi PLN itu tidak ada yang lebih membahagiakan ketika melihat senyum masyarakat ketika listrik hadir di rumah," kata Rudi.

Pemerintah lewat dukungan semua pihak terus mendorong untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% pada akhir tahun 2024.

"Diharapkan pada akhir tahun 2024 seluruh masyarakat dapat menikmati akses listrik (RE 100%) dan secara bertahap akan dialihkan menjadi pelanggan PLN agar memperoleh listrik yang lebih andal" pungkas Hari. (RO)

UPAYA PENINGKATAN RASIO ELEKTRIFIKASI DAN PEMERATAAN LISTRIK MASYARAKAT MELALUI BPBL

Guna mendorong peningkatan akses listrik di seluruh wilayah Indonesia, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI melaksanakan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik sebagai salah satu upaya peningkatan rasio elektrifikasi.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar saat menjadi narasumber talkshow bertajuk 'BPBL Sebagai Upaya Pemerataan Listrik Masyarakat' di CNN TV Jakarta, Senin, (07/08/2023).

"Pemerintah memberikan akses listrik kepada seluruh rakyat Indonesia yang kami terjemahkan dengan tercapainya rasio elektrifikasi. Nah ini (BPBL) juga merupakan perwujudan dari rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan akses listrik, jadi Pemerintah melakukan pembangunan jaringan ke seluruh pelosok Desa," ujar Wanhar.

Lebih lanjut Wanhar menjelaskan bahwa program BPBL menitik beratkan sasaran program kerjanya bagi rumah tangga tidak mampu belum berlistrik serta tidak mampu membayar biaya penyambungan listrik.

"Komisi VII DPR RI bersama pemerintah ingin memberikan biaya pasang baru listrik gratis kepada masyarakat. Masyarakat mungkin mampu membayar iuran listrik tapi untuk membayar biaya pasang barunya itu yang mereka tidak mampu," kata Wanhar.



Dirrektur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar menjadi narasumber talkshow bertajuk 'BPBL Sebagai Upaya Pemerataan Listrik Masyarakat' di CNN TV Jakarta, Senin, (07/08/2023).



Disampaikan Wanhar, pada tahun 2022 pemerintah bersama Komisi VII DPR RI menyetujui memberikan bantuan pasang baru listrik gratis ini kepada 80.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.

PT PLN (Persero) yang mendapat penugasan dari pemerintah juga menyatakan komitmennya dalam program BPBL ini. Hal ini seperti diungkapkan EVP Operasi Distribusi Sumatera Kalimantan PT PLN Agung Nugraha.

"PLN sebagai badan usaha milik negara memang melaksanakan penugasan ini dengan cara meningkatkan akses listrik terhadap sejumlah wilayah Indonesia. Jadi yang dilakukan PLN sebetulnya penugasan dari pemerintah, jadi terkait dengan persoalan bisnis itu sudah menjadi nomor dua, begitu pemerintah menugaskan kita membangun, ya kita laksanakan," kata Agung.

Agung juga menjelaskan bahwa PT PLN (Persero) terus menerus mengupayakan pencapaian target rasio elektrifikasi 100% dengan menyiapkan akses listrik kepada masyarakat melalui program listrik perdesaan PLN.

"Disamping kita memberikan bantuan gratis, pemerintah juga menugaskan PLN untuk membangun infrastruktur untuk mendekatkan listrik ke pemukiman-pemukiman yang memang jauh dari jaringan yang ada selama ini," ujar Agung.



Wanhar menyebutkan, pemerintah juga melakukan banyak upaya dalam menghadapi tantangan dalam mencapai target rasio elektrifikasi dan pemerataan akses listrik kepada masyarakat. Ia optimistis masyarakat dengan segera dapat menikmati listrik untuk kehidupan sehari-hari meski beberapa tantangan dalam upaya meningkatkan akses listrik untuk masyarakat sangat beragam, seperti lokasi yang sebagian besar jauh dari jaringan eksisting, berada di daerah terpencil (remote area) atau bermukim tersebar sehingga membutuhkan anggaran investasi yang besar, sampai rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk pasang instalasi dan bayar.

"Semoga dengan BPBL ini bisa kita selesaikan," pungkas Wanhar. (RO)



KUNJUNGI PLTU SUMSEL 8, DIRJEN GATRIK PASTIKAN DAYA LISTRIK SEGERA TERSALURKAN DI SISTEM SUMATERA

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memastikan pasokan listrik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu upayanya adalah dengan memastikan pasokan listrik dari pembangkit yang ada segera masuk kedalam sistem kelistrikan. Seperti pembangunan pembangkit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumatera Selatan (Sumsel) 8 (2x660MW) yang hampir rampung, diharapkan bisa segera masuk kedalam sistem kelistrikan Sumatera.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat melakukan Site Visit ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 (2x660 MW), Muara Enim, Sumatera Selatan, Jumat, (4/08/2023). "Harapannya bisa segera COD (Commercial Operation

Date) sesuai rencana tanggal 7 September 2023 dan segera masuk (sistem). Sudah ada solusi evakuasi (listrik) nya, sementara pakai transmisi 275kV dulu dari PLTU ke sistem Lahat dan Gumawang. Teman-teman PLN tadi juga menyampaikan 275 kV ini cukup untuk membawa daya listrik dari dua unit pembangkit ini," ungkap Jisman.

Jisman kemudian menjelaskan bahwa mengenai sistem transmisi di Sumatera perlu segera dibenahi karena pusat pembangkit listrik ada di Sumatera bagian selatan sementara demand listriknya lebih banyak di Sumatera bagian Utara.

"Kedepannya memang ini ada perlu segera kita selesaikan terkait transmisi, karena memang pusat listriknya ada di



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu saat melakukan Site Visit ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 8 (2x660 MW), Muara Enim, Sumatera Selatan, Jumat, (4/08/2023).

“Harapannya bisa segera COD (Commercial Operation Date) sesuai rencana tanggal 7 September 2023 dan segera masuk (sistem). Sudah ada solusi evakuasi (listrik) nya, sementara pakai transmisi 275kV dulu dari PLTU ke sistem Lahat dan Gumawang.”

Jisman Hutajulu Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

sumatera selatan sementara demand-nya itu sumatera utara jadi mau tidak mau kan harus ada transmisi,” jelas Jisman.

“Kita berharap agar berjalan smooth, kami harus melakukan akselerasi dan beberapa breaktrough. Infrastruktur transmisi harus berjalan, kami butuh evakuasi daya listrik yang dihasilkan nanti September,” ucap Dany.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdiharto menyampaikan PLN siap untuk menyalurkan listrik PLTU Sumsel 8 (2x660 MW) ke sistem Sumatera.

“Melalui jaringan listrik yg handal kami siap menyalurkan listrik PLTU Sumsel 8. Insha Allah September ini bisa selesai (dan disalurkan kedalam sistem) Muara

Enim-Lahat dan Muara Enim-Gumawang. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa sesuai realisasinya. Kita support apa yang dikerjakan HBAP (Huadian Bukit Asam Power),” ungkap Wiluyo.

PLTU Sumsel 8 (2x660 MW)

PLTU Sumsel 8 (2x660 MW) merupakan proyek bagian dari Program Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW. Pembangkit ini berlokasi di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pembangkit yang juga dikenal dengan nama PLTU Tanjung Lalang ini dibangun oleh PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) yang merupakan kerja sama strategis antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dengan China Huadian Hongkong Company Ltd (CHDHK).

Wakil Direktur Utama PT HBAP Dody Arsadian menyampaikan bahwa perjalanan pembangunan pembangkit sudah cukup panjang dan diharapkan pemerintah dapat membantu menuntaskan penyaluran listriknya.

“Perjalanan kami cukup panjang, sudah tinggal selangkah lagi kita harus menuntaskan hajat ini. Semoga kita segera dapat oleh-oleh (listrik tersalurkan). Harapannya tentu juga kami imbangi dengan kelancaran pembangunan selanjutnya,” kata Dody.

Pemerintah juga berharap dengan masuknya PLTU Sumsel 8 (2x660 MW) kedalam sistem listrik Sumatera dapat memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik di pulau Sumatera.

“Kita berharap nanti transmisi ini segera dikembangkan, sudah sampaikan ke Direktur PLN karena biar bagaimanapun Sumatera juga tumbuh (demand listriknya) maka harus segera dievakuasi. Kita dorong PLN segera membangun transmisinya, inipun dorongan dari Menteri agar dapat segera COD pembangkitnya,” tutup Jisman. (U)



INTEGRASI BIOFUEL

DALAM PETA JALAN ENERGI BARU TERBARUKAN

Integrasi biofuel ke peta jalan energi terbarukan ASEAN jangka panjang diharapkan dapat memenuhi kesenjangan antara target pangsa energi terbarukan dan realisasinya. Menurut data dari ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC), ASEAN memiliki target untuk meningkatkan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, tetapi perkembangan EBT baru mencapai 14,4% dalam bauran total pasokan energi primer.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu selaku chairman of ASEAN SOME (Senior Official Meeting on Energy) untuk ASEAN 2023 menyampaikan hal tersebut

dalam seminar internasional berjudul "Integrating Biofuels as the Main Pillar of ASEAN Renewable Energy Development for a Resilient and Sustainable Just Energy Transition", Rabu (2/8/2023), di Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari event series untuk ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke-41.

"Kami mendorong acara ini sebagai titik awal untuk diskusi mengenai pendekatan komprehensif dengan kolaborasi pemerintah dan non-pemerintah untuk memastikan biofuel memainkan peran penting dalam solusi energi terbarukan berkelanjutan jangka panjang untuk transisi energi kawasan ini. Kami terbuka terhadap rekomendasi dari semua pemangku kepentingan dan



Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam seminar internasional berjudul "Integrating Biofuels as the Main Pillar of ASEAN Renewable Energy Development for a Resilient and Sustainable Just Energy Transition", Rabu (2/8/2023).

para ahli mengenai cara meningkatkan transisi energi, termasuk dari sektor biofuel,” ujar Jisman.

Penyelenggaraan acara ini sejalan dengan visi Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, yang berkomitmen untuk mempromosikan agenda penting di berbagai sektor, termasuk energi. Fokus utamanya adalah memajukan transisi energi berkelanjutan, memperkuat kemandirian energi, dan meningkatkan ketahanan energi di kawasan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Yudo Dwinanda menyampaikan peran penting biofuel dalam transisi energi, khususnya dalam dekarbonisasi transportasi dengan menyediakan solusi rendah karbon.

“Berdasarkan BP Statistical Review of World Energy, pada tahun 2022, ASEAN berkontribusi signifikan terhadap pasokan biofuel dunia. Indonesia memproduksi 174 ribu BOEPD sebagai negara penghasil biofuel terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan Brasil.

Sedangkan Thailand menghasilkan 52 ribu BOEPD,” ujar Yudo.

Ia menyebut perkembangan biofuel di Indonesia terus meningkat. Program mandatori biodiesel mulai diimplementasikan pada 2008 dengan kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%.

Jumlah ini terus bertambah secara bertahap hingga pada Februari 2023 Indonesia menerapkan B35 secara nasional.

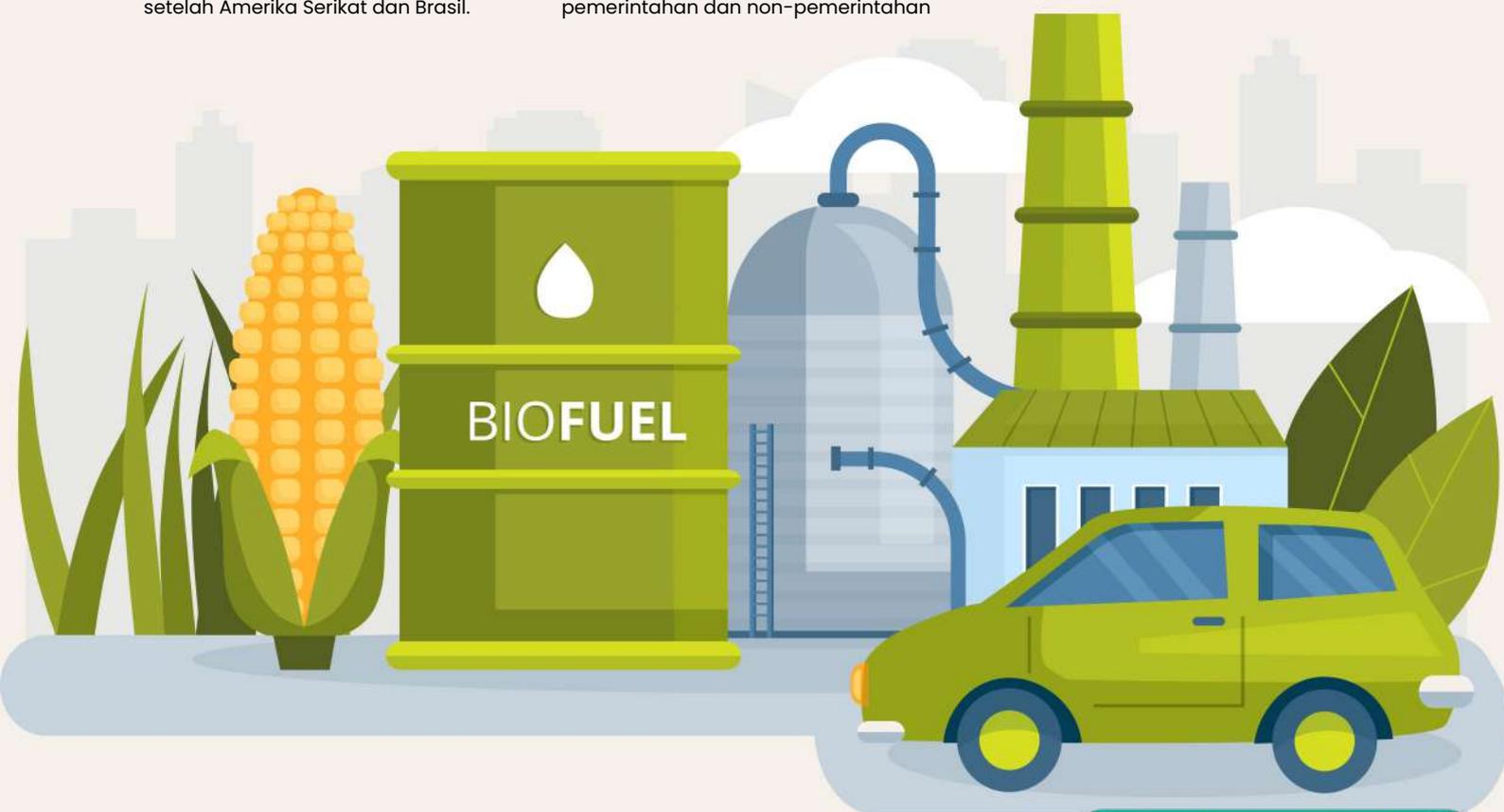
Ketua Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Darmin Nasution, menyatakan dukungannya terhadap agenda pemerintah negara-negara anggota ASEAN terkait transisi energi dan meminta tindak lanjut konkret dari forum ini.

“Kami sangat mendorong forum ini untuk merekomendasikan pembentukan “ASEAN Biofuel Network” untuk diajukan secara resmi dalam Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-41 di Bali pada 24 Agustus 2023. Hal ini dapat menjadi wadah bagi pelaku pemerintahan dan non-pemerintahan

untuk bekerja bersama dalam berbagai aspek pengembangan biofuel ASEAN, termasuk mempromosikan peluang bisnis, pertukaran pengetahuan, kolaborasi penelitian, dan banyak lainnya,” tuturnya.

Seminar ini mengangkat pentingnya biofuel sebagai alternatif penting untuk mencapai tujuan energi terbarukan di Indonesia dan ASEAN. Pengalaman luas di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya telah menunjukkan potensi biofuel sebagai solusi berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, sehingga meningkatkan ketahanan energi dan mendukung pembangunan ekonomi.

Seminar ini melibatkan pembicara dari para pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan ahli internasional dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Australia. Acara juga menghadirkan interaksi dengan para investor, komunitas bisnis, lembaga pemikir internasional, akademisi, dan media. (AMH)





Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Pandu Satria Jati dan Koordinator Komunikasi dan Layanan Informasi Publik dan Ketatausahaan Biro KLIK Kementerian ESDM Khoiria Oktaviani pada acara Talkshow "Mengenal Bantuan Pasang Baru Listrik dan Layanan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan" di Studio Radio Sonora Jakarta, Rabu (02/08/2023).

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DALAM MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM BPBL



Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk memberikan bantuan penyambungan listrik kepada rumah tangga tidak mampu yang belum berlistrik. Dalam pelaksanaan program tersebut diperlukan pemanfaatan sistem informasi dalam monitoring dan evaluasi serta pengawasan berjalannya program. Melalui berbagai kanal informasi dan pengaduan yang ada, masyarakat dapat menyampaikan apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Humas dan Layanan Informasi Publik Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Pandu Satria Jati pada acara Talkshow "Mengenal Bantuan Pasang Baru Listrik dan Layanan Informasi Ditjen Ketenagalistrikan" di Studio Radio Sonora Jakarta, Rabu (02/08/2023).

"Program BPBL kita lakukan monev secara berkala agar sesuai regulasi dan tidak menyimpang. Kanal-kanal informasi pengaduan kami bisa digunakan apabila masyarakat mendapati bahwa program BPBL ini ada penyimpangan atau

tidak sesuai, bisa dilaporkan ke kami sehingga bisa kami tindak tegas pelaku tadi” ungkap Pandu.

Lebih lanjut Pandu menjelaskan bahwa pelaksanaan monitoring tersebut juga bisa memanfaatkan aplikasi yang telah dibangun khusus oleh Icon Plus PT PLN (Persero) sehingga progress pembangunan BPBL dapat terlihat secara real time.

“Icon Plus selaku anak perusahaan PLN mengembangkan aplikasi monitoring BPBL sehingga terkontrol pengadaannya, programnya dan progressnya itu dapat dikontrol secara real time. Aplikasi juga bisa diakses oleh pimpinan (Direktur Jenderal Ketenagalistrikan), bisa melihat secara real time progress pembangunan BPBL. Selain teknologi informasi tentunya pemantauan di lapangan juga perlu dilakukan,” jelas Pandu.

Koordinator Komunikasi dan Layanan Informasi Publik dan Ketatausahaan Biro KLIK Kementerian ESDM Khoiria Oktaviani sebagai narasumber kedua menyampaikan bahwa dari sisi publik, keberadaan sistem informasi dapat membantu masyarakat menyampaikan usulan-usulannya.

“Terdapat saluran-saluran (penyampaian informasi dan pengaduan) bagi masyarakat yang belum mendapatkan manfaat kehadiran listrik, untuk mengusulkan kepada Ditjen Ketenagalistrikan melalui pemerintah daerahnya masing-masing. Kemudian tim Kementerian ESDM bekerja sama dengan PLN dan DPR akan melakukan verifikasi untuk menentukan masyarakat yang sesuai kriteria untuk menerima Program BPBL,” ujar Khoiria.

Kanal Informasi dan Pengaduan Kementerian ESDM

Kementerian ESDM menyediakan berbagai kanal agar masyarakat dapat meminta informasi dan menyampaikan pengaduan, untuk pengaduan sendiri Khoiria menyampaikan bahwa lebih banyak yang disampaikan melalui media sosial Kementerian ESDM.

“Kalau berbicara mengenai pengaduan, fun fact nya pengaduan lebih banyak itu di media sosial. Mungkin lebih ingin cepat ditanggapi, namun dari medsos itu kami salurkan lagi ke saluran pengaduan resmi untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi seperti PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), LapOR!, atau ingin mengobrol langsung bisa juga menghubungi Call Center 136, namun pada dasarnya ada prosedur yang harus diikuti,” ungkap Ria.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga menyediakan kanal-kanal pelayanan informasi dan pengaduan khusus

bidang ketenagalistrikan. Pandu menjelaskan bahwa kanal-kanal untuk menyampaikan aspirasi publik di Ditjen Ketenagalistrikan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Masyarakat dapat langsung berkunjung ke Gedung Ditjen Ketenagalistrikan Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, ke Ruang pelayanan publik terpadu di Pusat Pelayanan Publik untuk pengaduan tatap muka. Pengaduan bisa melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR dan dapat diakses di esdm.lapor.go.id, serta email resmi infogatrik@esdm.go.id, kemudian untuk konsumen listrik pelanggan PLN, masyarakat dapat melakukan pengaduan di kanal pengaduan konsumen listrik konsumen.listrik@esdm.go.id.

Ditjen Ketenagalistrikan menurut Pandu juga melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat per tiga bulan untuk mendapatkan masukan untuk perbaikan pelayanan informasi dan pengaduan yang diberikan.

“Melalui Survei Kepuasan Masyarakat, kami jadi mendapatkan masukan untuk perbaikan-perbaikan layanan Ditjen Ketenagalistrikan. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat, kami mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat triwulan II 2023 dengan nilai 3,79 (sangat baik) dari target 3,6 pada tahun ini. Kami juga melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan pengaduan secara rutin per triwulan” tutup Pandu. (UH)





Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Pembukaan Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik, di Jakarta, Jumat (28/07/23).

PEMERINTAH RESMI BUKA GELAR KONVERSI SEPEDA MOTOR LISTRIK

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, serta Kepolisian Republik Indonesia menggelar konversi perdana sepeda motor listrik dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat dalam mengikuti program bantuan pemerintah untuk konversi sepeda motor listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Pembukaan Gelar Konversi Sepeda Motor Listrik, di Jakarta, Jumat (28/07/23) menyampaikan bahwa sampai akhir Agustus 2023 ditargetkan terdapat 100 unit sepeda motor yang selesai dikonversi hingga surat-surat kendaraan konversi terbit.

Arifin menyampaikan bahwa pada tahun 2022 total jumlah kendaraan bermotor mencapai lebih dari 148 juta unit, yang didominasi oleh unit kendaraan roda dua dengan jumlah lebih dari 125 juta unit kendaraan roda dua. Pemakaian kendaraan berbahan bakar fosil tersebut menjadi salah satu penyebab kenaikan emisi.

“Penerapan kendaraan listrik di sektor transportasi menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” pungkas Arifin.

Arifin menambahkan pada tahun ini, Pemerintah telah memberikan bantuan insentif langsung sebesar Rp7 juta/unit untuk program konversi sepeda motor listrik berbasis baterai dengan target 50 ribu unit sepeda motor BBM konversi. Pada tahun 2024, targetnya meningkat menjadi 150 ribu unit.

“Untuk memudahkan masyarakat mengikuti program ini, pemerintah telah menyiapkan platform digital terintegrasi yang dapat diakses dengan menggunakan kata kunci pencarian “Konversi Motor Listrik,” ujar Arifin.

Dalam kesempatan tersebut Menteri ESDM menyampaikan bahwa skema program konversi motor listrik juga akan diperluas. Skema yang sudah berjalan saat ini adalah skema konversi konvensional, yaitu motor BBM konsumen dikonversi menjadi motor listrik dengan fixed baterai yang baterainya dimiliki oleh konsumen. Skema konversi baru adalah konversi swap baterai, yaitu motor BBM konsumen dikonversi menjadi motor listrik dengan baterai swap.

Lebih lanjut Arifin menyebutkan skema swap memberikan biaya pengeluaran lebih kecil bagi masyarakat karena baterai dimiliki oleh penyedia baterai swap dan tidak dibebankan kepada konsumen. Selain itu, waktu tunggu pengisian baterai sangat cepat karena baterai kosong tinggal di swap dengan baterai yang penuh di Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Diharapkan dengan tersedianya dua skema konversi tersebut, dapat memberikan pilihan yang terbaik bagi masyarakat dalam melakukan konversi motor BBM-nya ke listrik.

Arifin menegaskan, untuk mendukung ekosistem program konversi sepeda motor listrik berbasis baterai berjalan dengan baik dan lancar, dibutuhkan kolaborasi dan kemitraan dengan seluruh stakeholder, baik instansi Pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, asosiasi serta masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Kementerian Perhubungan dalam proses pelaksanaan uji tipe dan Kepolisian Republik Indonesia dalam pengurusan perubahan surat kendaraan dan juga kepada Kementerian Perindustrian serta stakeholders terkait lainnya yang turut mendorong penguatan ekosistem sepeda motor listrik konversi,” pungkas Arifin.

Butuh Sinergi Antarinstansi

Dalam acara ini juga hadir Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi yang menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah menerapkan berbagai insentif untuk kendaraan listrik.



Kementerian Perhubungan telah menetapkan kebijakan insentif fiskal biaya uji tipe Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), biaya Sertifikat Uji Tipe KBLBB dan insentif fiskal untuk kendaraan bermotor hasil konversi berupa Rp 0,- (nol Rupiah) untuk biaya Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe,” ujar Budi.

Budi menyampaikan juga bahwa dalam pelaksanaan kegiatan juga akan dilaksanakan Launching dan Demonstrasi Alat Uji Non Statis yang akan kita saksikan bersama mengenai tata kerja dan pengujian yang menggunakan alat uji tersebut.

“Dapat kami sampaikan bahwa jumlah sepeda motor konversi berdasarkan jumlah Sertifikat Uji Tipe dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang terbit per 27 Juli 2023 yaitu 183 unit. Hingga saat ini terdapat 26 bengkel konversi sepeda motor tersertifikasi dan 10 bengkel konversi selain sepeda motor tersertifikasi. Hal ini terus kita dorong untuk meningkatkan jumlah bengkel konversi baik untuk sepeda motor dan selain sepeda motor,” ujar Budi.

Saat ini Kementerian Perhubungan telah merumuskan dan menetapkan Peraturan Menteri tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai (sebagai perubahan atau revisi dari Peraturan Menteri 65 tahun 2020) dan saat ini Peraturan tersebut dalam proses pengundangan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dimana perubahan Peraturan tersebut adalah untuk mendukung percepatan pelayanan uji tipe sepeda motor hasil konversi.

Nantinya bengkel konversi akan diklasterisasi menjadi dua, dan pelaksanaan pengujian tipe tidak hanya dapat dilaksanakan di BPLJSKB (Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor) tetapi juga dapat dilaksanakan di seluruh BPTD di Indonesia, Pengujian Swasta, Badan Layanan Umum (BLU), dan Bengkel Konversi yang sudah terakreditasi A. (RA)



Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari bersama seluruh peserta pada acara Gatrik Goes to Campus dengan tema "Mengenal Lebih Dekat Tarif dan Subsidi Listrik" di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS di Surakarta (24/07/2023).

Perkenalkan Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik

Gatrik Goes to Campus Digelar di UNS

Untuk lebih memperkenalkan program dan kebijakan Ditjen Ketenagalistrikan kepada mahasiswa, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menggelar Gatrik Goes to Campus 2023 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Civitas akademika UNS diharapkan dapat mengenal kebijakan tarif dan subsidi listrik sehingga tema tersebut dapat menjadi bahan diskusi dan penulisan tugas akhir. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Ida Nuryatin Finahari pada acara Gatrik Goes to Campus dengan tema "Mengenal Lebih Dekat

Tarif dan Subsidi Listrik" di Kampus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS di Surakarta (24/07/2023)."

Acara ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi antara Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dengan teman-teman mahasiswa, sekaligus mengenalkan berbagai program dan kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen Ketenagalistrikan," ujar Ida. Ida menyampaikan melalui Gatrik Goes to Campus, Ditjen Ketenagalistrikan berharap dapat lebih mendekati

diri kepada para mahasiswa sehingga dapat terjalin hubungan komunikasi yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Melalui jejaring teman-teman mahasiswa, kami berharap program subsektor ketenagalistrikan dapat ikut dipublikasikan kepada rekan, komunitas dan keluarga.

Ia juga mengatakan bahwa energi listrik tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita. Sebagian besar aktivitas kita

mengandalkan energi listrik mulai dari mengecharge handphone, menonton televisi, mengikuti perkuliahan secara online, dan berbagai aktivitas kita sehari-hari tidak mungkin tanpa adanya listrik dalam hidup kita.

“Kita kan suka bete ya kalau ga ada listrik, mau beraktifitas menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu lah kami concern di sektor ketenagalistrikan untuk memperkenalkan kepada adek-adek mahasiswa,” kata Ida.

Ida menyampaikan hingga saat ini jumlah pelanggan listrik di Indonesia mencapai sekitar 86,73 Juta pelanggan. Meskipun setiap bulan kita membayar tagihan listrik, atau mengisi token listrik bagi pelanggan pra bayar, tapi mungkin belum banyak yang mengetahui bagaimana kebijakan tarif dan subsidi listrik yang berlaku di Indonesia.

“Dari 86 juta pelanggan hampir separuhnya disubsidi oleh pemerintah. Saya sampaikan juga bahwa pelanggan listrik mempunyai 38 jenis pelanggan, dan dari 38 jenis pelanggan, dari 25-nya itu disubsidi,” ungkap Ida.

Lebih lanjut Ida mengatakan bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik dilakukan setiap tiga bulan apabila terjadi perubahan terhadap realisasi indikator makro ekonomi. Tarif tenaga listrik per 1 Juli sampai dengan 30 September 2022 diputuskan tidak mengalami perubahan atau tetap. Penetapan ini bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan daya saing industri.

Seperti diketahui, golongan pelanggan listrik terbagi menjadi golongan yang mendapat subsidi dan non subsidi.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, dana subsidi yang disediakan pemerintah hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

GGTC Disambut Baik

Dalam kesempatan yang sama Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Bhimo Rizky Samudro menyambut baik kegiatan GGTC yang diselenggarakan Ditjen



“Kita kan suka bete ya kalau ga ada listrik, mau beraktifitas menjadi tidak nyaman. Oleh karena itu lah kami concern di sektor ketenagalistrikan untuk memperkenalkan kepada adek-adek mahasiswa.”

Ida Nuryatin Finahari
Sekretaris Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan. Beliau menyampaikan dengan kegiatan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa terkait tarif dan subsidi listrik.

“Kegiatan GGTC yang mengangkat tema Mengenal Tarif dan Subsidi Listrik ini menarik untuk didiskusikan dan menjadi suatu yang seksi untuk dibahas. Mudah-mudahan kegiatan ini juga dapat membawa berkah bagi teman-teman mahasiswa UNS,” ujar Bhimo.

Salah satu peserta GGTC, Salma, mahasiswi Fakultas Hukum UNS menyampaikan bahwa kegiatan GGTC ini sangat menarik dan sesuai target perihal edukasinya. Ia juga menyampaikan pemilihan narasumber juga tepat.

“Sejauh ini aku lihat menarik dan sesuai target perihal edukasinya, minesnya cuma satu, diadakan pas liburan semester jadi sepi, aku berani jamin kalau pas musim maba pasti rame, jadi aku bilang ini gong karena audiens juga hidup,” kata Salma.

Kegiatan Gatrik Goes to Campus 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ini menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Ahli Muda Selaku Subkoordinator Tarif Tenaga Listrik Ditjen Ketenagalistrikan Syarifuddin Ahmad, Vice President Tarif - Divisi Pengembangan Produk Niaga, Direktorat Retail Dan Niaga PLN Arief Mudhori, dan Dosen Ilmu Ekonomi FEB UNS Hery Sulistio Jati.

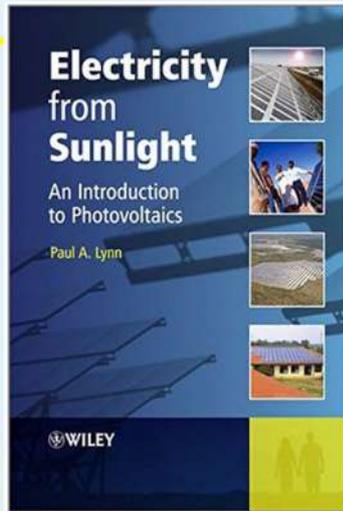
“Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang bersedia berbagi pengalaman dan berdiskusi bersama teman-teman mahasiswa, dan kami juga berharap teman-teman mahasiswa dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat memberikan masukan atau sumbang saran pemikiran bagi Ditjen Ketenagalistrikan,” tutup Ida. (AT)



LOMBA 17an *Gatrik*







Judul : Electricity from Sunlight: An Introduction to Photovoltaics

Pengarang : Paul A. Lynn

Jumlah Halaman : 221 halaman

Tahun Terbit 2011

Penerbit : Wiley

This book covers areas including:

- a brief history of PV, and the current international scene;
- the scientific principles of solar cells including silicon and new thin-film varieties;
- PV modules and arrays;
- grid-connected PV, from home systems up to large power plants;
- the wide diversity of stand-alone PV systems, and;
- the economic and environmental aspects of solar electricity.

Key equations and numerical examples are fully discussed, providing essential theoretical background. The text is supported by copious illustrations and more than eighty inspiring full colour photographs from around the world to demonstrate PV's huge range of practical applications.

This book is aimed at a wide readership including professionals working in related areas, and students taking introductory courses in PV and renewable energy. Its style and level will also appeal to energy planners and decision makers, members of environmental organisations, and the increasing number of people interested in generating their own electricity from sunlight.

Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan

Pengarang : Elyta Ras Ginting

Jumlah Halaman : 426 halaman

Tahun Terbit 2022

Penerbit : Bumi Aksara

Buku ini membahas kepailitan secara holistik. Dimulai dari sejarah hukum kepailitan, asas dan teori yang membenarkannya, makna kepailitan dan insolvensi. Keadaan insolven akan dibahas secara mendalam dari perspektif praktik bisnis dan perspektif sistem hukum civil law dan common law dan bagaimana keadaan insolven dimaknai dalam hukum kepailitan yang berlaku saat ini di Indonesia. Di samping itu, buku ini juga menguraikan tentang perbedaan antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), bagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur keduanya sebagai sarana pembayaran utang secara kolektif, hukum acara pembayaran utang, prosedur rinvoy dan akibat kepailitan bagi debitor, kreditor, dan akibat kepailitan bagi badan hukum (legal entity). Buku ini dapat membantu para pengamat hukum, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum dalam menambah wawasan mengenai hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia.



Cari Kata

Buletin September 2023

Carilah delapan (8) kata terkait ketenagalistrikan yang disembunyikan dalam huruf acak di bawah ini.

E L E K T R I F I K A S I P A M P E R E S D W T
 B H J L P C I J Y X Z C I O M D F J N O Z X K R
 C G Y I W P T E X E L I I U B A S G Y P H T P A
 G A D S T L O C S M N I H X U P S H D L Z S F N
 R A G Y R I H J S K H U I O G N A X A T K J B S
 I O S T B I M I U A K I G A R D U Y A S O H J M
 D H K L W I N I B Z D R I R H F G H R A U S Y I
 T I A N C M I S I T H I U S E D U S V I A S R S
 V O V I N T G E Y P O W E R I J U K D Q I B C I

Ketentuan:

1. Jawaban beserta identitas diri (**nama dan email/nomor HP**) agar dikirimkan melalui email ke infogatrik@esdm.go.id dengan subyek : **Cari Kata Buletin September 2023**.
2. Batas akhir pengumpulan jawaban adalah **15 Desember 2023**
3. **Dua pemenang** akan mendapat **e-money masing-masing Rp.100.000,-**
Pengumuman pemenang ada pada Buletin edisi Desember 2023 yang terbit pada awal Januari 2024

JAWABAN LOMBA TTS BULETIN KETENAGALISTRIKAN PERIODE JUNI 2023



|| PEMENANG
TTS BULETIN
JUNI 2023 ||



1. Malika Alia Rahayu
2. Syamsul Huda
3. Gendhis Resa Dianti

* Panitia akan menghubungi pemenang untuk mendapatkan evoucher masing-masing senilai Rp100.000,-

Yuk, Ketahui 5 Manfaat

BPBL

**Bantuan Pasang
Baru Listrik**

BPBL merupakan program bantuan pemasangan baru listrik secara gratis untuk masyarakat tidak mampu oleh Pemerintah melalui Kementerian ESDM.



Memberi akses listrik kepada masyarakat yang tidak mampu



Menaikkan rasio elektrifikasi



Menyediakan akses listrik yang aman dan andal karena instalasi yang terstandarisasi



Meningkatkan konsumsi listrik per kapita



Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat



gatrik.esdm.go.id

/



@infogatrik

/



Info Gatrik



Kerja Cepat, Kerja Cermat, Kerja Produktif

gatrik.esdm.go.id / [f](#) [@](#) [@infogatrik](#) / [Info Gatrik](#)



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
Jalan HR Rasuna Said Blok X2, Kav.7-8, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 5225180, Fax (021) 5256044
www.gatrik.esdm.go.id